

Akuntansi Keuangan Menengah:

Konsep, Standar, dan Aplikasi Praktis

Henny Wirianata, SE., MSi., Ak., CA., CSRS+., Dr. Dewi Puji Rahayu, S.E.,
M.Ak., Anisah Novi Karunia, M.Sc., Zakia Maulida Antono, S.S.T., M.Sc.,
Alfiyah Aditya Rahmawati, S.E., M.Ak., Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si., Retno
Hernawati, M.Pd., Willy Nurhayadi, S.E., M.Ak., dan Nursakti Niko Rosandy,
CA., CPMA., CMA., CGBA., CIR., CIB., ACPA.



Akuntansi Keuangan Menengah: Konsep, Standar, dan Aplikasi Praktis

Henny Wirianata, SE., MSi., Ak., CA., CSRS+.

Dr. Dewi Puji Rahayu, S.E., M.Ak.

Anisah Novi Karunia, M.Sc.

Zakia Maulida Antono, S.S.T., M.Sc.

Alfiyah Aditya Rahmawati, S.E., M.Ak.

Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si.

Retno Hernawati, M.Pd.

Willy Nurhayadi, S.E., M.Ak.

Nursakti Niko Rosandy, CA., CPMA., CMA., CGBA., CIR., CIB.,
ACPA.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Akuntansi Keuangan Menengah: Konsep, Standar, dan Aplikasi Praktis

Penulis : Henny Wirianata, SE., MSi., Ak., CA., CSRS+., Dr. Dewi Puji Rahayu, S.E., M.Ak., Anisah Novi Karunia, M.Sc., Zakia Maulida Antono, S.S.T., M.Sc., Alfiyah Aditya Rahmawati, S.E., M.Ak., Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si., Retno Hernawati, M.Pd., Willy Nurhayadi, S.E., M.Ak., dan Nursakti Niko Rosandy, CA., CPMA., CMA., CGBA., CIR., CIB., ACPA.

ISBN : 978-634-250-940-1 (PDF)

Penyunting Naskah : Difa Ramadhanti, S.Hum.

Tata Letak : Difa Ramadhanti, S.Hum.

Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email: penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp: 0878-3483-2315

Website: bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar berjudul *Akuntansi Keuangan Menengah: Konsep, Standar, dan Aplikasi Praktis* dapat hadir untuk masyarakat umum. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang akuntansi menengah secara jelas, dari konsep dasar hingga penerapan praktis dalam dunia nyata, agar siapa pun dapat mengikuti alur keuangan dengan lebih mudah.

Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh nyata, sehingga pembaca dari berbagai latar belakang dapat memahami laporan keuangan, standar akuntansi, serta cara menganalisis informasi keuangan dengan tepat. Setiap bagian dirancang untuk membantu pembaca memahami proses pencatatan dan pelaporan keuangan secara menyeluruh.

Jakarta, Desember 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Mengenal Akuntansi Keuangan Menengah	1
1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Menengah	1
1.2 Pentingnya dan Cakupan Akuntansi Keuangan Menengah ...	4
1.3 Peran Akuntansi Keuangan Menengah dalam Dunia Bisnis..	6
1.4 Latihan Soal.....	8
Bab 2: Kerangka Konseptual dan Standar Akuntansi Keuangan	10
2.1 Mengenal Kerangka Konseptual Akuntansi Keuangan.....	10
2.2 Pentingnya dan Kegunaan Kerangka Konseptual	13
2.3 Elemen dan Karakteristik Laporan Keuangan.....	17
2.4 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.....	20
2.5 Latihan Soal.....	23
Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Informasi.....	24
3.1 Konsep Umum Penyajian Laporan Keuangan	24
3.2 Komponen Utama Laporan Keuangan	28
3.3 Prinsip dan Standar Akuntansi	34
3.4 Pengungkapan Informasi Tambahan	37
3.5 Latihan Soal.....	40
Bab 4: Kas, Piutang, dan Investasi Jangka Pendek.....	42
4.1 Kas dan Setara Kas.....	42
4.2 Piutang Usaha dan Pengelolaannya.....	45

4.3 Investasi Jangka Pendek.....	50
4.4 Pengungkapan dan Pelaporan.....	53
4.5 Latihan Soal.....	57
Bab 5: Persediaan dan Penilaian Aset Lancar	58
5.1 Pengertian Persediaan.....	58
5.2 Jenis dan Klasifikasi Persediaan.....	61
5.3 Prosedur Penilaian Persediaan.....	65
5.4 Penurunan Nilai dan Pelaporan Persediaan.....	69
5.5 Latihan Soal.....	72
Bab 6: Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.....	73
6.1 Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap.....	73
6.2 Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap	74
6.3 Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap	77
6.4 Pengertian dan Karakteristik Aset Tak Berwujud.....	79
6.5 Latihan Soal.....	80
Bab 7: Kewajiban Jangka Pendek dan Panjang.....	82
7.1 Pengertian dan Klasifikasi Kewajiban	82
7.2 Kewajiban Jangka Pendek.....	84
7.3 Kewajiban Jangka Panjang.....	86
7.4 Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan.....	89
7.5 Latihan Soal.....	91
Bab 8: Ekuitas dan Instrumen Keuangan	92
8.1 Pengertian Ekuitas dan Instrumen Keuangan.....	92
8.2 Jenis-Jenis Ekuitas dan Instrumen Keuangan	94
8.3 Mekanisme Pasar dan Regulasi.....	95
8.4 Peran Ekuitas dalam Pembiayaan Perusahaan	97

8.5 Latihan Soal.....	99
Bab 9: Pendapatan, Beban, dan Laba Rugi Komprehensif ...	100
9.1 Pengertian Pendapatan dan Beban	100
9.2 Pengakuan Pendapatan dan Beban	101
9.3 Laba Rugi Komprehensif	103
9.4 Penyajian dalam Laporan Keuangan	105
9.5 Latihan Soal.....	106
Bab 10: Analisis dan Interpretasi Laporan Keuangan	108
10.1 Konsep Dasar Analisis Laporan Keuangan.....	108
10.2 Pentingnya Analisis Laporan Keuangan	110
10.3 Teknik dan Rasio dalam Analisis Keuangan.....	113
10.4 Latihan Soal.....	116
Profil Penulis	117
Daftar Pustaka.....	126

Bab 1: Mengenal Akuntansi

Keuangan Menengah

1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Menengah

Akuntansi keuangan menengah merupakan cabang dari disiplin akuntansi yang secara khusus membahas pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan dengan tingkat kompleksitas menengah hingga tinggi. Pada dasarnya, akuntansi keuangan menengah berperan sebagai jembatan antara konsep-konsep dasar akuntansi yang telah dipelajari dalam tingkat pengantar dan aplikasi lanjutan yang lebih kompleks di tingkat lanjutan. Dalam konteks ini, akuntansi keuangan menengah tidak hanya menitikberatkan pada pemrosesan data keuangan, tetapi juga pada pemahaman terhadap prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum, khususnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun berdasarkan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*.

Pengantar akuntansi keuangan menengah biasanya diawali dengan pembahasan mendalam mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan yang mencakup tujuan pelaporan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, serta definisi dan kriteria pengakuan atas elemen-elemen laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kerangka ini menjadi fondasi penting dalam

membentuk pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana dan mengapa suatu transaksi atau peristiwa ekonomi diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Hal ini penting karena laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang menyediakan informasi relevan bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Cakupan materi dalam akuntansi keuangan menengah umumnya meliputi topik-topik seperti pengakuan dan pengukuran kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, aset takberwujud, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, serta instrumen keuangan. Setiap topik dibahas dengan teknik teoritis dan praktis yang berimbang, sehingga mahasiswa atau praktisi dapat memahami tidak hanya bagaimana mencatat transaksi, tetapi juga alasan di balik perlakuan akuntansi tertentu. Misalnya, dalam perlakuan akuntansi atas aset tetap, tidak cukup hanya memahami prosedur penyusutan, tetapi juga harus mampu menjelaskan dasar pemilihan prosedur tersebut dan implikasinya terhadap laporan keuangan serta keputusan ekonomi yang dihasilkan.

Perkembangan akuntansi keuangan menengah juga dipengaruhi oleh dinamika global yang menuntut peningkatan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, penerapan standar berbasis *IFRS* menjadi penting dalam menciptakan konsistensi, keterbandingan, dan keandalan informasi keuangan lintas yurisdiksi. Hal ini selaras dengan peran akuntansi keuangan menengah sebagai landasan utama dalam menyiapkan

laporan keuangan entitas bisnis yang relevan dan andal bagi investor, kreditor, regulator, dan pengguna lainnya (Barth, 2018).

Lebih jauh, penguasaan akuntansi keuangan menengah juga diperlukan sebagai dasar untuk menganalisis laporan keuangan secara kritis dan untuk memahami dampak kebijakan akuntansi terhadap posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Kemampuan ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis modern, di mana keputusan yang tepat harus didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap akuntansi keuangan menengah akan memberikan kontribusi signifikan bagi profesi akuntansi, baik dalam bidang pelaporan, audit, perpajakan, maupun konsultasi keuangan (Kieso et al., 2020).

Dengan demikian, akuntansi keuangan menengah bukan hanya merupakan kelanjutan dari akuntansi dasar, tetapi juga titik awal untuk membentuk keahlian akuntansi profesional yang komprehensif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan regulasi. Melalui pemahaman mendalam terhadap konsep, prinsip, dan aplikasi praktis dalam akuntansi keuangan menengah, seorang akuntan diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya sesuai standar, tetapi juga relevan, jujur, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang berorientasi pada nilai.

1.2 Pentingnya dan Cakupan Akuntansi Keuangan Menengah

Akuntansi keuangan menengah merupakan cabang dari ilmu akuntansi yang membahas secara lebih mendalam konsep, prinsip, serta penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan entitas. Mata kuliah atau kajian ini menduduki posisi strategis karena menjembatani pemahaman dasar akuntansi dan praktik pelaporan keuangan tingkat lanjut. Dalam mata kuliah ini, terdapat penekanan pada pemahaman yang komprehensif terhadap *framework* pelaporan keuangan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum, seperti IFRS atau PSAK.

1.2.1 Pentingnya Akuntansi Keuangan Menengah

Tujuan utama akuntansi keuangan menengah adalah membekali mahasiswa atau praktisi dengan pemahaman yang kuat terhadap proses pelaporan keuangan yang akurat dan andal. Melalui kajian ini, peserta belajar untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam konteks yang lebih kompleks, seperti transaksi pendapatan, aset tetap, liabilitas jangka panjang, hingga instrumen keuangan.

Akuntansi keuangan menengah juga bertujuan membangun keterampilan analitis dalam mengevaluasi dampak ekonomi dari suatu transaksi dan bagaimana hal tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan agar relevan dan dapat dibandingkan. Pemahaman ini penting bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku

kepentingan, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator (Schroeder et al., 2019).

1.2.2 Cakupan Kajian

Cakupan akuntansi keuangan menengah mencakup cakupan topik yang lebih spesifik dan mendalam dibandingkan pengantar akuntansi. Kajian ini dimulai dari kerangka konseptual pelaporan keuangan, dilanjutkan dengan pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, serta pendapatan dan beban. Setiap topik dikaji secara teknis sesuai standar yang berlaku, misalnya PSAK 72 terkait pendapatan dari kontrak dengan pelanggan atau PSAK 107 dan 109 tentang instrumen keuangan.

Selain aspek teknis, cakupannya juga mencakup interpretasi atas prinsip-prinsip akuntansi serta bagaimana penerapan prinsip tersebut dapat berbeda tergantung pada konteks entitas dan kebijakan akutansinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *judgment* dan estimasi akuntansi menjadi bagian integral dari kajian ini (Kieso et al., 2020).

Akuntansi keuangan menengah umumnya dibagi dalam dua hingga tiga tingkatan (Intermediate Accounting I dan II), dengan cakupan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, serta pengungkapan tambahan. Pada tingkat lanjut, juga dibahas mengenai isu-isu kontemporer dalam pelaporan keuangan, seperti keberlanjutan dan integrasi informasi non-keuangan.

1.2.3 Peran dalam Dunia Profesional

Dalam praktik profesional, akuntansi keuangan menengah menjadi fondasi bagi pekerjaan auditor, analis keuangan, akuntan manajemen, maupun pembuat kebijakan. Kompetensi dalam memahami laporan keuangan yang kompleks dan menginterpretasikan data keuangan sangat dibutuhkan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi organisasi. Oleh karena itu, penguasaan materi akuntansi keuangan menengah menjadi salah satu kriteria penting dalam sertifikasi profesional, seperti CPA atau CA.

Seiring perkembangan regulasi dan teknologi, peran akuntansi keuangan menengah juga berkembang mencakup pemanfaatan sistem informasi akuntansi, *data analytics*, dan penerapan akuntansi berbasis digital dalam pelaporan keuangan modern.

1.3 Peran Akuntansi Keuangan Menengah dalam Dunia Bisnis

Akuntansi keuangan menengah merupakan bidang riset yang menjembatani pemahaman dasar akuntansi dan praktik akuntansi lanjutan. Dalam dunia bisnis modern yang semakin kompleks dan teregulasi, akuntansi keuangan menengah memegang peran penting dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai standar dan dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini menjadi esensial bagi perusahaan

dalam mengambil keputusan ekonomi strategis yang berbasis informasi akuntansi.

1.3.1 Pengertian dan Cakupan Akuntansi Keuangan Menengah

Akuntansi keuangan menengah mencakup teori, standar, dan praktik penyajian laporan keuangan untuk entitas bisnis yang berorientasi laba. Cakupannya meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (*recognition, measurement, presentation, and disclosure*) dari berbagai unsur laporan keuangan seperti aset, liabilitas, pendapatan, dan ekuitas.

Berbeda dengan akuntansi pengantar yang berfokus pada pencatatan transaksi dasar, akuntansi keuangan menengah lebih mendalam dalam membahas isu-isu kompleks seperti akuntansi instrumen keuangan, sewa, pendapatan kontraktual, hingga penurunan nilai aset. Penggunaan standar pelaporan internasional seperti *IFRS (International Financial Reporting Standards)* juga menjadi fokus utama dalam praktik akuntansi keuangan menengah (Clark et al., 2020).

1.3.2 Fungsi Strategis dalam Dunia Bisnis

Dalam praktik bisnis, akuntansi keuangan menengah memberikan kerangka kerja untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sangat penting bagi investor, kreditor, regulator, dan manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan entitas.

Lebih jauh, penyusunan laporan yang akurat dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pasar dan

mempermudah akses terhadap pembiayaan. Akuntansi keuangan menengah juga membantu manajemen dalam menyusun kebijakan akuntansi yang sejalan dengan strategi bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan eksternal (Brüggemann et al., 2017).

1.3.3 Kontribusi dalam Transparansi dan Tata Kelola Perusahaan

Salah satu kontribusi utama akuntansi keuangan menengah adalah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan menerapkan standar pelaporan yang ketat dan sistem pengendalian internal yang kuat, perusahaan dapat meminimalkan risiko manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini sangat relevan dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pada era digital dan globalisasi saat ini, tuntutan terhadap keterbukaan informasi keuangan semakin tinggi. Oleh karena itu, profesional akuntansi yang menguasai akuntansi keuangan menengah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan berintegritas.

1.4 Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian Akuntansi Keuangan Menengah dan perbedaannya dengan Akuntansi Dasar!
2. Sebutkan dan jelaskan tujuan utama dari Akuntansi Keuangan Menengah!

3. Apa saja cakupan yang tercakup dalam Akuntansi Keuangan Menengah?
4. Bagaimana peran Akuntansi Keuangan Menengah dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis?
5. Mengapa penerapan standar akuntansi seperti PSAK penting dalam penyusunan laporan keuangan?

Bab 2: Kerangka Konseptual dan Standar Akuntansi Keuangan

2.1 Mengenal Kerangka Konseptual Akuntansi Keuangan

2.1.1 Definisi dan Pentingnya Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akuntansi keuangan merupakan dasar teoretis yang digunakan dalam penyusunan, penerapan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Ia berfungsi sebagai panduan normatif yang menjelaskan prinsip, asumsi, dan konsep fundamental yang mendasari praktik pelaporan keuangan. Tujuan utama kerangka konseptual adalah menciptakan konsistensi dan koherensi dalam proses pelaporan, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan, relevan, dan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas.

Dalam konteks *financial reporting*, kerangka konseptual membantu menetapkan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan unsur laporan keuangan, seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya berperan sebagai panduan teknis bagi penyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai alat analitis dalam menilai kualitas

informasi akuntansi. Lembaga penyusun standar seperti *International Accounting Standards Board* (IASB) dan *Financial Accounting Standards Board* (FASB) menjadikan kerangka konseptual sebagai dasar bagi pengembangan *accounting standards* yang berlaku secara global (IFRS Foundation, 2018).

2.1.2 Struktur dan Komponen Utama Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akuntansi keuangan terdiri atas beberapa komponen utama, yakni tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan, definisi unsur laporan keuangan, serta prinsip pengakuan dan pengukuran. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, khususnya investor, kreditor, dan pihak regulator.

Karakteristik kualitatif informasi keuangan meliputi relevansi dan keandalan (*faithful representation*). Informasi yang relevan harus mampu memengaruhi keputusan pengguna melalui nilai prediktif atau konfirmatifnya. Sementara itu, representasi yang andal menuntut agar informasi bebas dari kesalahan material dan disajikan secara jujur terhadap substansi ekonomi suatu transaksi. Selain dua karakteristik utama tersebut, terdapat pula atribut peningkat seperti keterbandingan (*comparability*), verifikasiabilitas (*verifiability*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan keterpahaman (*understandability*) yang memastikan kualitas laporan keuangan semakin optimal (Schroeder et al., 2019).

2.1.3 Peran Kerangka Konseptual dalam Penyusunan Standar Akuntansi

Kerangka konseptual berfungsi sebagai fondasi dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan. Dalam praktiknya, kerangka ini membantu badan penyusun standar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan akuntansi baru memiliki dasar konseptual yang kuat. Misalnya, ketika IASB atau FASB mengembangkan standar baru, mereka mengacu pada prinsip dalam kerangka konseptual agar keputusan yang diambil konsisten dengan tujuan pelaporan keuangan dan karakteristik kualitatif informasi.

Selain itu, kerangka konseptual juga berperan penting ketika tidak terdapat standar akuntansi spesifik untuk suatu transaksi atau peristiwa ekonomi tertentu. Dalam kondisi demikian, penyusun laporan keuangan dapat menggunakan panduan dari kerangka konseptual untuk menentukan perlakuan akuntansi yang paling tepat. Dengan demikian, kerangka konseptual memastikan bahwa praktik pelaporan keuangan tetap konsisten dan transparan, meskipun dalam situasi yang belum diatur secara eksplisit oleh standar yang ada.

2.1.4 Tantangan dan Arah Pengembangan di Masa Depan

Meskipun memiliki peran fundamental, kerangka konseptual terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan lingkungan bisnis global. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana kerangka ini dapat mengakomodasi transaksi ekonomi modern, seperti instrumen keuangan derivatif, aset digital, dan *sustainability reporting*. Konsep-konsep tradisional dalam akuntansi

sering kali tidak lagi memadai untuk menjelaskan fenomena keuangan baru yang bersifat kompleks dan dinamis.

Selain itu, munculnya tuntutan terhadap pelaporan nonkeuangan—seperti *environmental, social, and governance* (ESG) disclosure—mendorong perlunya integrasi antara pelaporan keuangan dan pelaporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kerangka konseptual di masa depan harus lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan yang semakin beragam. Dengan demikian, kerangka konseptual tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas di era ekonomi global.

2.2 Pentingnya dan Kegunaan Kerangka Konseptual

2.2.1 Pengertian dan Pentingnya Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual (*conceptual framework*) merupakan fondasi teoritis yang digunakan dalam pengembangan standar akuntansi keuangan. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan bagi penyusun standar, praktisi, dan pengguna laporan keuangan dalam memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Secara umum, tujuan utama kerangka konseptual adalah untuk menyediakan dasar pemikiran yang konsisten dalam pengembangan standar akuntansi baru serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan isu-isu akuntansi yang belum diatur secara spesifik.

Kerangka konseptual juga bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingan (*comparability*) laporan keuangan antarperusahaan dan antarperiode. Dengan adanya dasar konseptual yang seragam, penyusun standar seperti *International Accounting Standards Board* (IASB) dapat memastikan bahwa setiap standar baru memiliki keselarasan logis dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah ada. Selain itu, kerangka ini memberikan landasan bagi pengguna laporan keuangan—seperti investor, kreditor, dan regulator—untuk memahami informasi keuangan secara lebih transparan dan relevan (IASB, 2018).

Tujuan lainnya adalah untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan mendasarkan setiap kebijakan pada prinsip konseptual, entitas pelapor dapat menghindari praktik pelaporan yang bersifat subyektif atau manipulatif. Oleh karena itu, kerangka konseptual tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menjamin integritas informasi keuangan.

2.2.2 Kegunaan Kerangka Konseptual dalam Akuntansi

Fungsi utama kerangka konseptual adalah memberikan pedoman bagi penyusunan, penerapan, dan interpretasi standar akuntansi. Dalam konteks pengembangan standar, kerangka ini membantu IASB dan lembaga sejenis dalam menetapkan prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan. Misalnya, ketika muncul transaksi ekonomi baru—seperti aset digital atau instrumen keuangan kompleks—kerangka konseptual dapat digunakan sebagai

rujukan untuk menentukan perlakuan akuntansinya, bahkan sebelum standar spesifik diterbitkan.

Selain berfungsi bagi penyusun standar, kerangka konseptual juga memberikan panduan bagi praktisi akuntansi dalam pengambilan keputusan yang belum diatur secara eksplisit. Dalam hal ini, akuntan dapat menggunakan prinsip-prinsip umum seperti relevansi (*relevance*) dan penyajian yang jujur (*faithful representation*) untuk menilai apakah suatu informasi harus diakui atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Fungsi ini menjadikan kerangka konseptual sebagai alat penyeimbang antara kepatuhan terhadap aturan dan penerapan penilaian profesional (*professional judgment*).

Fungsi lain yang tak kalah penting adalah mendukung konsistensi antarstandar akuntansi dan mencegah munculnya konflik prinsip. Dengan adanya kerangka konseptual, setiap standar yang diterbitkan memiliki dasar yang sama sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya interpretasi yang saling bertentangan. Di sisi pengguna laporan keuangan, kerangka ini membantu memahami alasan di balik penyusunan standar dan memberikan konteks terhadap kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan (Schroeder, Clark, & Cathey, 2019).

2.2.3 Relevansi Kerangka Konseptual terhadap Praktik Akuntansi Modern

Dalam praktik akuntansi modern, kerangka konseptual memiliki relevansi yang semakin besar karena lingkungan bisnis dan teknologi terus berkembang dengan cepat. Fenomena seperti

transaksi digital, aset kripto, dan pengungkapan keberlanjutan (*sustainability reporting*) memerlukan dasar konseptual yang kuat untuk menjaga konsistensi pelaporan. Meskipun standar akuntansi tidak selalu mampu mengikuti perkembangan setiap inovasi ekonomi, kerangka konseptual tetap memberikan arah prinsipil bagi penilaian dan pengambilan keputusan akuntansi.

Selain itu, kerangka konseptual mendukung penyelarasan antara standar akuntansi nasional dan internasional. Di Indonesia, misalnya, *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disusun dengan mengacu pada kerangka yang dikembangkan oleh IASB agar selaras dengan praktik internasional. Penyelarasan ini penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan mempermudah integrasi pasar keuangan global.

Dengan demikian, kerangka konseptual bukan sekadar dokumen teoretis, melainkan pilar utama dalam menjaga koherensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan. Melalui penerapan yang konsisten, kerangka ini membantu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan berkeadilan.

2.3 Elemen dan Karakteristik Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian dan Pentingnya Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana utama bagi entitas bisnis untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan kondisi keuangan kepada para pemangku kepentingan. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak internal maupun eksternal, termasuk investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan, laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen komunikasi yang menjembatani hubungan antara aktivitas ekonomi perusahaan dan pengguna informasi. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum agar hasilnya dapat diinterpretasikan secara konsisten. Penyajian yang transparan dan terstandar juga menjadi dasar bagi akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja entitas (Kieso et al., 2020).

2.3.2 Elemen-Elemen Dasar Laporan Keuangan

Elemen laporan keuangan menggambarkan komponen utama yang membentuk struktur laporan secara keseluruhan. Berdasarkan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dan *Standar Akuntansi Keuangan* (SAK), terdapat lima elemen pokok yang saling berkaitan: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban.

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dapat berupa kas, piutang, persediaan, properti, maupun investasi. **Liabilitas** mencerminkan kewajiban entitas yang timbul dari transaksi masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. **Ekuitas** merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas; ekuitas menjadi ukuran kepemilikan dan modal yang ditanamkan pemegang saham.

Selanjutnya, **pendapatan** mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, sedangkan **beban** menggambarkan penurunan manfaat ekonomi akibat konsumsi sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Pemahaman atas kelima elemen ini menjadi landasan penting dalam menyusun laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang komprehensif (Harrison et al., 2021).

2.3.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Selain elemen dasar, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif agar informasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna. Karakteristik utama meliputi **relevansi** dan **keandalan** (*faithful representation*).

Relevansi berarti informasi dalam laporan keuangan harus memiliki kemampuan memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa

kini, atau masa depan. Informasi dikatakan relevan apabila mengandung nilai prediktif dan nilai konfirmasi.

Sementara itu, **keandalan** menuntut agar informasi bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur kondisi ekonomi perusahaan. Unsur keandalan meliputi penyajian jujur (*faithful representation*), kelengkapan (*completeness*), dan netralitas (*neutrality*). Dua karakteristik pendukung lainnya adalah **dapat dibandingkan (*comparability*)** dan **dapat dipahami (*understandability*)**, yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis tren kinerja dan menilai efektivitas manajemen dari waktu ke waktu.

Kombinasi antara elemen dasar dan karakteristik kualitatif inilah yang menjadikan laporan keuangan sebagai alat utama untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan.

2.3.4 Implikasi terhadap Akuntabilitas dan Pengambilan Keputusan

Kualitas laporan keuangan secara langsung memengaruhi kredibilitas entitas dan efektivitas pengambilan keputusan ekonomi. Laporan yang memenuhi prinsip relevansi dan keandalan memungkinkan investor menilai prospek laba dan risiko, sementara pemerintah dapat merancang kebijakan fiskal berdasarkan data yang akurat. Sebaliknya, laporan yang bias atau tidak transparan dapat menimbulkan distorsi informasi dan mengarah pada keputusan investasi yang salah.

Oleh karena itu, lembaga pengatur seperti *International Accounting Standards Board* (IASB) dan Dewan Standar Akuntansi

Kuangan (DSAK) Indonesia menekankan pentingnya konsistensi penerapan standar pelaporan keuangan. Dalam era digital saat ini, transparansi laporan keuangan juga diperkuat dengan sistem akuntansi berbasis teknologi yang memungkinkan verifikasi dan analisis data secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, pemenuhan elemen dan karakteristik kualitatif laporan keuangan tidak hanya menjadi tuntutan teknis, tetapi juga etis dalam menjaga integritas dunia bisnis.

2.4 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Penerapan *Standar Akuntansi Keuangan* (SAK) di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya harmonisasi standar pelaporan keuangan dengan praktik internasional. Tujuan utama penerapan SAK adalah menciptakan transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan dapat diandalkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Seiring perkembangan globalisasi ekonomi, Indonesia menyesuaikan kerangka SAK dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)*, dengan tetap mempertahankan relevansi terhadap kondisi ekonomi dan hukum nasional.

2.4.1 Kerangka Penerapan dan Konvergensi terhadap IFRS

Proses konvergensi SAK terhadap IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap oleh *Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

(DSAK) di bawah naungan *Ikatan Akuntan Indonesia* (IAI). Kerangka ini bertujuan menyelaraskan prinsip akuntansi nasional dengan standar internasional agar laporan keuangan entitas bisnis Indonesia dapat diterima di pasar global.

SAK di Indonesia terdiri atas *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) dan *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan* (ISAK). PSAK berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan, sedangkan ISAK memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap penerapan PSAK tertentu yang memerlukan klarifikasi. Menurut Suwardjono (2019), penerapan IFRS dalam konteks Indonesia memerlukan adaptasi terhadap realitas ekonomi dan kelembagaan nasional agar prinsip-prinsip global dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengabaikan karakteristik lokal.

Konvergensi IFRS juga berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan memperkuat kepercayaan investor internasional terhadap laporan keuangan entitas di Indonesia. Dengan mengadopsi prinsip *fair value measurement* dan *substance over form*, laporan keuangan diharapkan lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

2.4.2 Adaptasi terhadap Kondisi Ekonomi dan Regulasi Nasional

Meskipun mengacu pada IFRS, penerapan SAK di Indonesia tidak dilakukan secara penuh tanpa penyesuaian. Adaptasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan struktur perekonomian nasional, kapasitas entitas pelapor, serta sistem hukum dan perpajakan yang

berlaku. Salah satu contohnya adalah penerapan PSAK untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), yang dirancang agar lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah (UKM).

Selain itu, peran otoritas keuangan seperti *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) dan *Kementerian Keuangan* menjadi penting dalam memastikan penerapan standar dilakukan secara konsisten dan sesuai regulasi. Harmonisasi antara PSAK, peraturan pasar modal, dan ketentuan perpajakan perlu dijaga agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan akuntansi yang dapat membingungkan pengguna laporan keuangan.

Menurut Tamm (2021), tantangan utama dalam adopsi IFRS di negara berkembang seperti Indonesia terletak pada kesiapan sumber daya manusia, biaya implementasi, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas audit dan pelaporan. Oleh karena itu, teknik bertahap dan edukatif menjadi strategi penting agar konvergensi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

2.4.3 Dampak terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan SAK berbasis IFRS membawa dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Standar ini menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dan relevan, sehingga memudahkan investor, kreditur, dan regulator dalam menilai kinerja serta posisi keuangan perusahaan.

Selain itu, penerapan IFRS mendorong praktik akuntansi berbasis prinsip (*principle-based system*) daripada berbasis aturan

(*rule-based system*), sehingga memberikan fleksibilitas dalam penerapan sambil menuntut profesionalisme tinggi dari akuntan. Kondisi ini mendorong penguatan etika profesi dan integritas pelaporan yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam jangka panjang, harmonisasi standar akuntansi Indonesia dengan IFRS juga diharapkan meningkatkan daya saing nasional di kancah ekonomi global. Dengan laporan keuangan yang dapat dibandingkan secara internasional, perusahaan Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi dan memperluas akses pasar modal global.

2.5 Latihan Soal

1. Jelaskan tujuan utama dari kerangka konseptual dalam akuntansi keuangan.
2. Apa saja elemen laporan keuangan menurut kerangka konseptual?
3. Mengapa karakteristik kualitatif penting dalam penyajian laporan keuangan?
4. Bagaimana perbedaan antara PSAK dan IFRS dalam konteks penerapan di Indonesia?
5. Berikan contoh bagaimana kerangka konseptual digunakan dalam praktik akuntansi.

Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Informasi

3.1 Konsep Umum Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media utama komunikasi informasi keuangan antara entitas pelapor dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, investor, kreditur, dan masyarakat. Selain itu, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks akuntansi, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan keuangan di masa depan.

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam praktik akuntansi modern. Proses ini bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kondisi ekonomi suatu entitas. Laporan keuangan yang

disajikan dengan baik akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh manajemen internal maupun pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, konsep umum penyajian laporan keuangan memberikan kerangka dasar (*framework*) yang menjelaskan prinsip, tujuan, serta standar yang harus dipatuhi dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, transparan, relevan, dan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas.

3.1.1 Pengertian dan Pentingnya Penyajian Laporan Keuangan

Secara konseptual, penyajian laporan keuangan adalah tahapan akhir dari proses akuntansi yang meliputi penyusunan, pengklasifikasian, dan pengungkapan data keuangan dalam bentuk laporan formal. Laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum, seperti *International Financial Reporting Standards (IFRS)* atau *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)* di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas dalam suatu periode tertentu secara transparan dan akurat.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020), penyajian laporan keuangan yang baik memungkinkan pengguna laporan memahami kondisi ekonomi perusahaan secara menyeluruh, menilai profitabilitas, serta mengevaluasi kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga

mencerminkan prinsip etika dan tanggung jawab profesional akuntan dalam menjaga keandalan informasi yang disampaikan kepada publik.

Selain itu, tujuan lain dari penyajian laporan keuangan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi. Dalam konteks sektor publik, misalnya, laporan keuangan berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga atau entitas ekonomi.

3.1.2 Komponen dan Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan mencakup beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu laporan posisi keuangan (*statement of financial position*), laporan laba rugi (*income statement*), laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*), laporan arus kas (*cash flow statement*), dan catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statements*). Setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang mendukung penyampaian informasi secara komprehensif mengenai kondisi dan aktivitas entitas.

Dalam proses penyajiannya, laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar akuntansi, antara lain relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Prinsip relevansi menuntut agar informasi yang disajikan memiliki nilai prediktif dan konfirmatif terhadap pengambilan keputusan. Keandalan memastikan bahwa informasi bebas dari kesalahan material dan bias,

sedangkan keterbandingan memungkinkan pengguna membandingkan laporan antarperiode atau antarentitas. Prinsip keterpahaman menekankan pentingnya penyajian informasi dalam format yang jelas dan sistematis agar mudah dipahami oleh pengguna nonspesialis.

Menurut Baridwan (2017), keberhasilan penyajian laporan keuangan bergantung pada konsistensi penerapan prinsip akuntansi dan ketepatan waktu pelaporan. Hal ini penting agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan perencanaan yang efektif. Ketidaktepatan atau ketidaklengkapan penyajian informasi keuangan dapat mengurangi kredibilitas entitas dan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

3.1.3 Tantangan dan Perkembangan dalam Penyajian Laporan Keuangan Modern

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi pasar telah membawa tantangan baru dalam penyajian laporan keuangan. Digitalisasi sistem akuntansi, penerapan *cloud accounting*, dan otomatisasi pelaporan telah mengubah cara organisasi menyusun dan menyajikan informasi keuangannya. Selain itu, meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan (*sustainability reporting*) juga menuntut entitas untuk mengungkapkan aspek non-keuangan, seperti dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (*Environmental, Social, and Governance – ESG*).

Standar pelaporan modern kini menekankan pentingnya integrasi antara laporan keuangan tradisional dengan laporan keberlanjutan, menciptakan teknik pelaporan terpadu (*integrated*

reporting). Teknik ini bertujuan agar laporan tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan, tetapi juga nilai jangka panjang yang dihasilkan perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Perubahan ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan bagian dari strategi komunikasi korporat yang berorientasi pada transparansi dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, konsep umum penyajian laporan keuangan terus berkembang menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan teknologi. Di era digital, penyajian informasi yang cepat, akurat, dan relevan menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi dalam mempertahankan kepercayaan publik serta mencapai keberlanjutan bisnis jangka panjang.

3.2 Komponen Utama Laporan Keuangan

3.2.1 Neraca (*Statement of Financial Position*)

Neraca merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pada akhir periode akuntansi. Laporan ini menampilkan tiga elemen penting, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, seperti kas, piutang, persediaan, serta aset tetap. Liabilitas mencerminkan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga, sedangkan ekuitas menggambarkan hak residual pemilik setelah dikurangi seluruh kewajiban.

Tujuan utama penyusunan neraca adalah memberikan informasi mengenai kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Dengan memahami komposisi aset dan liabilitas, pengguna laporan keuangan dapat menilai stabilitas keuangan serta likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, neraca menjadi dasar bagi investor dan kreditor dalam menilai kesehatan finansial entitas (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020). Berikut merupakan contoh neraca pada suatu perusahaan yang mencerminkan kondisi aset, kewajiban, dan ekuitas (modal).

PT XYZ JAYA
NERACA
PER 31 Desember Tahun 2023 & 2024

URAIAN	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Bank	250.000.000	180.000.000
Piutang Usaha	120.000.000	100.000.000
Persediaan Barang Dagang	80.000.000	60.000.000
Jumlah Aset Lancar	450.000.000	340.000.000
Aset Tetap		
Peralatan Kantor	300.000.000	280.000.000
Kendaraan	200.000.000	200.000.000
Akumulasi Penyusutan	(150.000.000)	(120.000.000)

Jumlah Aset Tetap	350.000.000	360.000.000
TOTAL ASET	800.000.000	700.000.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Lancar		
Utang Usaha	90.000.000	70.000.000
Utang Gaji	10.000.000	15.000.000
Jumlah Kewajiban Lancar	100.000.000	85.000.000
EKUITAS		
Modal Disetor	500.000.000	500.000.000
Laba Ditahan	200.000.000	115.000.000
Jumlah Ekuitas	700.000.000	615.000.000
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	800.000.000	700.000.000

Analisis singkat dari penyajian neraca per 31 Desember 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

- Jika aset > kewajiban, entitas memiliki posisi keuangan yang sehat.
- Jika aset tetap meningkat, berarti ada investasi atau pengembangan kapasitas.
- Jika ekuitas bertambah, bisa disebabkan oleh laba bersih atau surplus tahun berjalan.

3.2.2 Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan laba rugi (*income statement*) menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu, terutama terkait pendapatan, beban, dan laba bersih. Melalui laporan ini, pihak manajemen dapat menilai efektivitas strategi operasional serta efisiensi penggunaan sumber daya. Laba bersih yang diperoleh mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi dan menjadi indikator penting bagi pengambilan keputusan investasi.

Sementara itu, laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*) menunjukkan pergerakan saldo ekuitas dari awal hingga akhir periode. Laporan ini mencakup informasi mengenai laba ditahan, tambahan modal, pembagian dividen, serta penyesuaian lainnya. Bagi pemangku kepentingan, laporan ini penting untuk memahami bagaimana keputusan keuangan memengaruhi hak kepemilikan dan struktur modal perusahaan (Horngren, Harrison, & Oliver, 2019).

Kedua laporan ini memiliki keterkaitan erat karena laba bersih yang dihasilkan dari laporan laba rugi akan memengaruhi saldo ekuitas dalam laporan perubahan ekuitas. Dengan demikian, keduanya berperan penting dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan stabilitas modal perusahaan. Berikut bentuk laporan laba rugi dari hasil operasional perusahaan selama 2 tahun.

PT XYZ JAYA

Laporan Laba-Rugi

31 Desember Tahun 2023 & 2024

URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan		
Penjualan Bersih	1.200.000.000	1.000.000.000
Harga Pokok Penjualan (HPP)	(700.000.000)	(600.000.000)
Laba Kotor	500.000.000	400.000.000
Beban Operasional		
Beban Gaji	(120.000.000)	(100.000.000)
Beban Sewa	(50.000.000)	(50.000.000)
Beban Listrik dan Air	(30.000.000)	(25.000.000)
Beban Penyusutan	(40.000.000)	(35.000.000)
Total Beban Operasional	(240.000.000)	(210.000.000)
Laba Operasional	260.000.000	190.000.000
Pendapatan/Beban Lain-lain		
Pendapatan Bunga	10.000.000	8.000.000
Beban Bunga	(5.000.000)	(6.000.000)
Laba Sebelum Pajak	265.000.000	192.000.000
Pajak Penghasilan (PPh)	(53.000.000)	(38.400.000)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	212.000.000	153.600.000

Berdasarkan penyajian laporan laba rugi pada 31 Desember 2023 dan 2024, maka analisis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Perhatikan pada elemen-elemen berikut:

- $\text{Laba Kotor} = \text{Penjualan Bersih} - \text{HPP}$
- $\text{Laba Operasional} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Operasional}$
- $\text{Laba Bersih} = \text{Laba Operasional} + (\text{Pendapatan/Beban lain-lain}) - \text{Pajak}$

Makna:

- Apabila laba bersih meningkat, efisiensi dan kinerja entitas dikategorikan dalam kondisi membaik.
- Jika beban operasional meningkat tajam, perlu dilakukan analisis efisiensi biaya.

3.2.3 Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan arus kas (*cash flow statement*) merupakan instrumen penting yang menggambarkan pergerakan kas masuk dan kas keluar selama periode tertentu. Laporan ini diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi menunjukkan arus kas dari kegiatan utama perusahaan, sedangkan aktivitas investasi mencerminkan penggunaan dana untuk perolehan aset jangka panjang. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan transaksi yang memengaruhi struktur modal, seperti penerbitan saham atau pembayaran pinjaman.

Informasi arus kas memberikan pemahaman yang lebih realistis tentang likuiditas dan solvabilitas perusahaan dibandingkan hanya dengan data akrual. Selain itu, laporan ini membantu dalam

menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban serta mendanai pertumbuhan di masa depan.

Komponen terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statements*), berfungsi memberikan penjelasan tambahan yang tidak dapat disajikan secara rinci dalam laporan utama. Catatan ini meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset dan kewajiban, serta pengungkapan informasi penting lainnya. Tanpa catatan ini, pengguna laporan keuangan akan sulit memahami konteks dan interpretasi dari angka-angka yang tersaji. Oleh sebab itu, catatan atas laporan keuangan menjadi bagian integral yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan perusahaan.

3.3 Prinsip dan Standar Akuntansi

Prinsip dan standar akuntansi merupakan landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Melalui penerapan prinsip yang konsisten, organisasi dapat menyajikan informasi keuangan secara transparan bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan regulator. Standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap transaksi ekonomi dalam laporan keuangan.

3.3.1 Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi

Prinsip akuntansi mencakup seperangkat aturan dan asumsi yang menjadi dasar dalam pencatatan serta pelaporan transaksi

keuangan. Prinsip tersebut meliputi prinsip entitas ekonomi, kelangsungan usaha (*going concern*), keseragaman (*consistency*), kehati-hatian (*prudence*), serta pengungkapan penuh (*full disclosure*). Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2020), penerapan prinsip akuntansi yang tepat memungkinkan laporan keuangan menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar dan dapat diandalkan oleh pihak eksternal.

Selain itu, prinsip akuntansi juga mengedepankan keseimbangan antara relevansi dan keandalan informasi. Dalam konteks ini, relevansi mengacu pada kemampuan informasi untuk memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan, sedangkan keandalan berkaitan dengan sejauh mana informasi tersebut bebas dari bias dan kesalahan material. Penerapan prinsip yang konsisten memastikan laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan strategis.

3.3.2 Standar Akuntansi di Indonesia: PSAK

Di Indonesia, pedoman utama dalam praktik akuntansi diatur melalui *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK berfungsi mengatur tata cara penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan kebutuhan pelaporan nasional dan internasional. Proses penyusunan PSAK mengikuti perkembangan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang ditetapkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB).

Seiring dengan globalisasi ekonomi, Indonesia terus melakukan konvergensi PSAK dengan IFRS untuk meningkatkan

transparansi dan daya banding laporan keuangan antarnegara. Menurut IAI (2023), penerapan PSAK berbasis IFRS diharapkan dapat memperkuat kredibilitas sistem pelaporan keuangan nasional serta mempermudah investasi lintas batas. Dengan demikian, standar akuntansi domestik berfungsi tidak hanya sebagai alat kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat integritas pasar keuangan.

3.3.3 IFRS sebagai Standar Global

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar akuntansi global yang dirancang untuk menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan di berbagai yurisdiksi. IFRS menekankan prinsip berbasis konsep (*principle-based approach*) dibandingkan aturan yang ketat (*rule-based approach*), sehingga memberikan fleksibilitas bagi entitas dalam menerapkan penilaian profesional. Weygandt et al. (2020) menyatakan bahwa penerapan IFRS membantu meningkatkan kualitas informasi keuangan melalui penyelarasan praktik pelaporan antarnegara.

Adopsi IFRS juga berdampak pada peningkatan efisiensi pasar modal internasional, karena investor dapat dengan mudah membandingkan kinerja keuangan perusahaan lintas negara. Namun demikian, penerapan IFRS memerlukan komitmen besar, baik dari sisi pelatihan tenaga akuntan, pembaruan sistem informasi, maupun penyesuaian kebijakan organisasi. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi IFRS tidak hanya bergantung pada regulasi formal,

tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia.

3.4 Pengungkapan Informasi Tambahan

3.4.1 Konsep Pengungkapan Informasi Tambahan

Pengungkapan informasi tambahan merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Informasi tambahan ini mencakup berbagai penjelasan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam angka-angka laporan keuangan utama, seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Dengan demikian, pengungkapan ini berfungsi sebagai pelengkap yang menjembatani kesenjangan informasi antara penyusun laporan dan pengguna laporan.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020), pengungkapan informasi tambahan berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Melalui pengungkapan yang memadai, pengguna laporan keuangan dapat memahami konteks di balik angka yang disajikan, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, asumsi yang mendasari estimasi, serta risiko yang mungkin memengaruhi kinerja dan posisi keuangan entitas.

3.4.2 Jenis dan Cakupan Informasi Tambahan

Secara umum, informasi tambahan yang diungkapkan dalam laporan keuangan meliputi tiga kategori utama, yaitu pengungkapan risiko, asumsi penting, dan kebijakan akuntansi.

Pertama, **pengungkapan risiko** menjelaskan potensi ketidakpastian yang dapat memengaruhi hasil keuangan perusahaan. Risiko ini dapat berupa risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, maupun risiko operasional. Pengungkapan risiko membantu investor dan kreditor dalam menilai stabilitas dan ketahanan perusahaan terhadap perubahan lingkungan bisnis dan ekonomi.

Kedua, **pengungkapan asumsi penting** berkaitan dengan dasar estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti tingkat diskonto, umur manfaat aset, serta nilai wajar instrumen keuangan. Asumsi ini harus dijelaskan secara jelas agar pengguna laporan memahami sejauh mana laporan keuangan bergantung pada estimasi manajemen.

Ketiga, **pengungkapan kebijakan akuntansi** meliputi penjelasan tentang prosedur dan prinsip yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti prosedur penyusutan, pengakuan pendapatan, serta perlakuan terhadap aset tidak berwujud. Standar akuntansi mensyaratkan bahwa kebijakan ini diungkapkan secara konsisten dan mudah dipahami agar dapat dibandingkan antarperiode dan antarkorporasi (Scott, 2019).

3.4.3 Peran Pengungkapan dalam Transparansi dan Akuntabilitas

Pengungkapan informasi tambahan memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Dengan memberikan informasi yang relevan dan lengkap, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap prinsip *good corporate governance*. Transparansi yang tinggi memungkinkan para pengguna laporan keuangan, seperti investor, auditor, regulator, dan masyarakat, untuk menilai kinerja perusahaan secara objektif.

Selain itu, pengungkapan yang memadai juga membantu dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya, investor dapat menggunakan informasi tambahan untuk menilai prospek laba masa depan, sedangkan kreditor dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam konteks globalisasi, praktik pengungkapan yang transparan juga menjadi indikator kepatuhan terhadap standar internasional seperti *International Financial Reporting Standards (IFRS)*.

Namun demikian, perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara keterbukaan informasi dan perlindungan atas data sensitif yang bersifat strategis. Pengungkapan yang berlebihan tanpa pertimbangan dapat menimbulkan risiko kompetitif atau penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, kebijakan pengungkapan harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada relevansi, keandalan, serta keterbandingan informasi.

3.5 Latihan Soal

- 1. Jelaskan mengapa penyajian laporan keuangan yang akurat sangat penting bagi investor!
- 2. Sebutkan dan jelaskan lima komponen utama laporan keuangan!
- 3. Mengapa pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangandiperlukan?
- 4. Bagaimana standar PSAK mempengaruhi penyajian laporan keuangan di Indonesia?
- 5. Berikut ini saldo akun-akun di PT. KESELARASAN HATI & JIWA setelah dilakukan pencatatan penyesuai pada akhir periode akuntansi. Semua akun memiliki saldo normal.

“PT. XYZ JAYA”

DAFTAR SALDO SETELAH PENYESUAIAN

PER 31 DESEMBER 2024

NAMA AKUN	DAFTAR SALDO (Rp)
Kas	2.550.000
Piutang usaha	610.000
Bahan habis pakai	100.000
Dibayar dimuka beban sewa mesin	150.000
Kendaraan	4.200.000
Peralatan kantor	1.200.000
Utang usaha	370.000
Utang wesel	3.000.000
Utang beban operasional	48.000

kendaraan	
Utang beban utilitas	165.000
Utang pajak penghasilan	40.000
Diterima dimuka pendapatan usaha	55.000
Dividen	100.000
Modal saham	3.500.000
Saldo laba	500.000
Pendapatan usaha	1.615.000
Beban iklan	30.000
Beban penyusutan kendaraan	100.000
Akumulasi penyusutan kendaraan	100.000
Beban penyusutan peralatan kantor	20.000
Akumulasi penyusutan peralatan kantor	20.000
Beban administrasi	25.000
Beban operasional kendaraan	53.000
Beban bahan habis pakai	45.000
Beban sewa mesin	25.000
Beban utilitas	175.000
Beban pajak penghasilan	280.000
Pendapatan lain-lain	250.000

Diminta:

- Laporan Laba Rugi per 31 Desember 2024
- Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024
- Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2024

Bab 4: Kas, Piutang, dan Investasi Jangka Pendek

4.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan komponen penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan tingkat likuiditas dan stabilitas keuangan suatu perusahaan. Dalam konteks akuntansi, kas didefinisikan sebagai aset paling likuid yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Kas mencakup uang tunai yang tersedia di tangan, saldo rekening giro di bank, serta bentuk lain dari instrumen keuangan yang dapat segera digunakan tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Sementara itu, setara kas (*cash equivalents*) merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid, mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat, serta memiliki risiko perubahan nilai yang tidak material. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan, surat berharga pemerintah, dan *money market instruments* seperti *Treasury bills* (Kieso et al., 2019).

Manajemen kas yang efektif merupakan aspek krusial dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Perusahaan perlu memastikan bahwa jumlah kas yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembayaran gaji,

pembelian bahan baku, dan pelunasan kewajiban jangka pendek, tanpa menimbulkan kelebihan kas yang tidak produktif. Kelebihan kas yang tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi potensi keuntungan karena dana tersebut tidak diinvestasikan secara optimal, sedangkan kekurangan kas dapat menimbulkan risiko gagal bayar dan mengganggu reputasi perusahaan di mata kreditor maupun investor. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan pengelolaan kas yang seimbang antara likuiditas dan profitabilitas.

Selain itu, pengendalian internal terhadap kas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan kecurangan. Prosedur seperti pemisahan fungsi antara penerimaan dan pengeluaran kas, rekonsiliasi bank secara berkala, serta penggunaan sistem pembayaran digital dapat meningkatkan akurasi dan keamanan transaksi keuangan. Dalam praktiknya, sistem manajemen kas modern juga didukung oleh teknologi seperti *cash management system* (CMS) yang mempermudah pemantauan arus kas secara real-time dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait likuiditas perusahaan.

Dari perspektif analisis keuangan, posisi kas dan setara kas memberikan gambaran awal mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas seperti *current ratio* dan *cash ratio* sering digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menutupi utang lancar dengan aset lancar yang dimilikinya. Namun, tingginya saldo kas tidak selalu menunjukkan kinerja keuangan yang baik, karena bisa jadi mencerminkan rendahnya efisiensi penggunaan dana. Oleh

karena itu, manajemen perlu menyeimbangkan antara menjaga likuiditas dan memaksimalkan tingkat pengembalian melalui investasi yang tepat.

Lebih jauh, pengelolaan kas juga memiliki kaitan erat dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Proyeksi arus kas (*cash flow forecasting*) diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan dana dan menentukan strategi pendanaan yang optimal. Dengan proyeksi yang akurat, perusahaan dapat menghindari risiko kekurangan likuiditas serta memanfaatkan peluang investasi secara efisien. Selain itu, pengelolaan kas yang baik membantu menjaga stabilitas operasional, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat posisi keuangan perusahaan di tengah dinamika ekonomi global (Brigham & Houston, 2019).

Dengan demikian, kas dan setara kas bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi merupakan indikator vital dari kesehatan finansial perusahaan. Melalui manajemen kas yang efektif, perusahaan dapat memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk menjalankan operasional, meminimalkan risiko keuangan, serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh karena itu, setiap entitas bisnis perlu menerapkan sistem pengelolaan kas yang terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis agar dapat mencapai efisiensi, stabilitas, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

.

4.2 Piutang Usaha dan Pengelolaannya

Piutang usaha merupakan salah satu aset lancar penting dalam laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan jumlah klaim terhadap pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Dalam konteks manajemen keuangan, pengelolaan piutang usaha yang efektif berperan besar dalam menjaga likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas arus kas perusahaan. Ketidaktepatan dalam pengelolaan piutang dapat menimbulkan risiko keuangan yang signifikan, termasuk meningkatnya jumlah piutang tak tertagih (*bad debts*). Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan kebijakan kredit yang sehat dan sistem pengawasan piutang yang terstruktur.

4.2.1 Pengertian dan Karakteristik Piutang Usaha

Piutang usaha (*accounts receivable*) timbul ketika perusahaan menjual barang atau jasa kepada pelanggan dengan pembayaran yang ditangguhkan. Transaksi ini memberikan manfaat berupa peningkatan penjualan dan perluasan pangsa pasar, namun juga menimbulkan risiko ketidakpastian dalam penerimaan kas. Piutang usaha termasuk dalam kategori aset lancar karena diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan.

Karakteristik utama piutang usaha meliputi nilai nominal tagihan, tanggal jatuh tempo, serta kebijakan kredit yang menyertainya. Untuk menjaga keandalan laporan keuangan, piutang harus diukur berdasarkan nilai realisasi bersih, yaitu jumlah yang

diperkirakan dapat diterima setelah dikurangi cadangan kerugian piutang.

4.2.2 Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko

Kebijakan kredit yang efektif merupakan fondasi utama dalam mengelola piutang usaha. Perusahaan harus menyeimbangkan antara tujuan meningkatkan penjualan melalui penawaran kredit dan risiko gagal bayar yang mungkin timbul. Penetapan kebijakan kredit biasanya meliputi evaluasi kelayakan pelanggan, penentuan batas kredit (*credit limit*), serta jangka waktu pembayaran (*credit terms*).

Evaluasi kelayakan pelanggan dapat dilakukan melalui analisis 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Analisis ini membantu perusahaan menilai kemampuan serta niat pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, pengendalian internal yang kuat seperti rekonsiliasi piutang secara periodik dan otorisasi transaksi kredit juga diperlukan untuk meminimalkan penyimpangan dan kerugian keuangan (Horngren et al., 2019).

4.2.3 Prosedur Penilaian dan Pengakuan Kerugian Piutang

Dalam akuntansi, kerugian piutang tidak dapat dihindari sepenuhnya karena adanya pelanggan yang gagal membayar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan menerapkan prosedur pencadangan kerugian piutang agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang realistis. Dua prosedur yang umum digunakan adalah **prosedur persentase penjualan** dan **prosedur umur piutang** (*aging method*).

1. **Prosedur persentase penjualan** — menghitung cadangan kerugian piutang berdasarkan persentase tertentu dari total penjualan kredit selama periode berjalan. Prosedur ini menitikberatkan pada prinsip *matching*, yaitu menyamakan antara pendapatan dengan biaya pada periode yang sama.

Contoh soal:

PT Sinar Cahaya memiliki penjualan kredit selama tahun 2024 sebesar Rp 400.000.000. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Perusahaan memperkirakan 3% dari penjualan kredit tidak tertagih.

Hitunglah beban kerugian piutang dan buat jurnal penyesuaiannya!

Pembahasan:

$$\begin{aligned}\text{Estimasi kerugian piutang} &= 3\% \times \text{Rp } 400.000.000 \\ &= \text{Rp } 12.000.000\end{aligned}$$

Jurnal Penyesuaian:

Bad Debt Expense	Rp 12.000.000
Allowance for Doubtful Accounts	Rp 12.000.000

2. **Prosedur umur piutang** — mengklasifikasikan saldo piutang berdasarkan lama keterlambatan pembayaran. Semakin lama piutang tertunggak, semakin besar persentase kemungkinan tidak tertagih. Prosedur ini dianggap lebih akurat karena mencerminkan risiko aktual dari setiap kelompok umur piutang.

Penerapan prosedur cadangan ini menghasilkan akun *Allowance for Doubtful Accounts*, yang dikurangkan dari total

piutang usaha untuk mendapatkan nilai realisasi bersih. Dengan demikian, laporan keuangan mencerminkan nilai aset yang lebih realistis dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*).

Contoh soal:

Pada akhir tahun 2024, PT Cahaya Mandiri memiliki saldo piutang sebesar Rp100.000.000 yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Umur Piutang	Saldo	Persentase tidak tertagih
Belum jatuh tempo	Rp 60.000.000	2%
1 – 30 hari lewat jatuh tempo	Rp 25.000.000	5%
> 30 hari	Rp 15.000.000	10%

Saldo *Allowance for Doubtful Accounts* sebelum penyesuaian adalah Rp1.500.000 (kredit).

Hitung berapa penyesuaian yang perlu dilakukan dan buat jurnal penyesuaiannya.

Pembahasan:

Umur Piutang	Saldo	% tidak tertagih	Estimasi Kerugian
Belum jatuh tempo	Rp 60.000.000	2%	Rp 1.200.000

1 – 30 hari lewat jatuh tempo	Rp 25.000.000	5%	Rp 1.250.000
> 30 hari	Rp 15.000.000	10%	Rp 1.500.000
Total estimasi Cadangan yang dibutuhkan			Rp 3.950.000

Saldo *Allowance* saat ini = Rp 1.500.000 (kredit)

Cadangan yang dibutuhkan = Rp 3.950.000

Penyesuaian yang harus ditambahkan:

$$\text{Rp 3.950.000} - \text{Rp 1.500.000} = \text{Rp 2.450.000}$$

Maka jurnal penyesuaian:

Bad Debt Expense Rp 2.450.000

Allowance for Doubtful Accounts Rp 2.450.000

4.2.4 Strategi Efisiensi dan Penagihan Piutang

Efisiensi dalam pengelolaan piutang tidak hanya bergantung pada sistem pencatatan, tetapi juga pada kebijakan penagihan yang proaktif. Perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penagihan melalui pengiriman peringatan pembayaran sebelum jatuh tempo, penawaran diskon pembayaran cepat (*cash discount*), serta penerapan sanksi terhadap keterlambatan.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti sistem *accounting software* dan *customer relationship management* (CRM) dapat membantu perusahaan memantau status piutang secara real time. Analisis rasio keuangan seperti *average collection period* dan *accounts receivable turnover* juga penting untuk menilai efektivitas kebijakan kredit dan kinerja penagihan.

Manajemen piutang yang efisien tidak hanya meningkatkan arus kas, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan yang memiliki reputasi baik. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi terhadap stabilitas finansial perusahaan dan memperkecil risiko kredit macet.

Secara keseluruhan, piutang usaha merupakan instrumen penting dalam kegiatan bisnis modern yang membutuhkan pengelolaan profesional. Melalui penerapan kebijakan kredit yang selektif, sistem pengawasan yang disiplin, serta estimasi cadangan kerugian yang akurat, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan penjualan dan pengendalian risiko keuangan. Dengan dukungan teknologi dan manajemen berbasis data, efisiensi pengelolaan piutang dapat terus ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan usaha dan profitabilitas jangka panjang.

4.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan dana kas yang tidak terpakai dalam waktu singkat. Dalam praktik akuntansi dan manajemen keuangan, investasi jangka pendek didefinisikan sebagai penempatan dana perusahaan pada instrumen keuangan yang bersifat likuid, berisiko rendah, dan dapat dicairkan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Jenis investasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan kas, tetapi juga

sebagai instrumen untuk memperoleh pendapatan tambahan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan.

4.3.1 Karakteristik dan Pentingnya Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu tingkat likuiditas tinggi, risiko relatif rendah, dan jangka waktu yang singkat. Berbeda dengan investasi jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan modal, investasi jangka pendek difokuskan pada pengelolaan kas dan optimalisasi pendapatan bunga atau capital gain kecil dalam periode tertentu (Ross et al., 2019).

Tujuan utama dari investasi jangka pendek adalah menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Perusahaan sering kali menghadapi surplus kas sementara, misalnya dari hasil penjualan atau keuntungan operasi. Agar dana tersebut tidak menganggur, manajer keuangan menempatkannya dalam instrumen keuangan jangka pendek yang memberikan imbal hasil, seperti deposito, obligasi pemerintah, atau surat berharga komersial (*commercial paper*). Strategi ini membantu perusahaan menjaga efisiensi keuangan sekaligus meminimalkan biaya peluang dari dana yang tidak produktif.

4.3.2 Jenis-Jenis Investasi Jangka Pendek

Terdapat beberapa jenis instrumen yang umum digunakan dalam investasi jangka pendek, antara lain:

- 1. Deposito berjangka.**

Merupakan simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu, biasanya antara satu hingga dua belas bulan. Deposito

memberikan tingkat bunga tetap dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, sehingga risikonya sangat rendah.

2. Surat berharga pemerintah.

Instrumen seperti *Treasury bills* atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) termasuk investasi jangka pendek yang aman karena dijamin oleh pemerintah. Instrumen ini cocok bagi perusahaan yang mengutamakan keamanan dan stabilitas pendapatan.

3. Saham sementara atau reksa dana pasar uang.

Saham sementara dapat dibeli untuk tujuan spekulatif jangka pendek, sedangkan reksa dana pasar uang menempatkan dana pada portofolio instrumen keuangan berisiko rendah. Keduanya menawarkan likuiditas tinggi dengan potensi keuntungan lebih besar dibanding deposito, meskipun risikonya sedikit lebih tinggi (Gitman & Zutter, 2022).

4. Obligasi jangka pendek dan *commercial paper*.

Commercial paper merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan dengan reputasi baik. Instrumen ini menawarkan imbal hasil menarik dalam waktu singkat, umumnya di bawah satu tahun.

Pemilihan instrumen investasi jangka pendek harus mempertimbangkan profil risiko, kebutuhan likuiditas, serta kebijakan keuangan perusahaan.

4.3.3 Pentingnya dan Risiko Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek memberikan beberapa manfaat strategis bagi perusahaan. Pertama, menjaga likuiditas dengan tetap

menghasilkan pendapatan dari kas yang tidak terpakai. Kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan kas dengan menyeimbangkan antara kebutuhan operasional dan potensi keuntungan. Ketiga, memberikan fleksibilitas dalam mengatur arus kas tanpa mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang.

Namun, investasi jangka pendek juga memiliki risiko yang perlu diantisipasi. Fluktuasi suku bunga, perubahan nilai pasar, serta inflasi dapat memengaruhi nilai imbal hasil. Selain itu, jika manajemen tidak selektif dalam memilih instrumen, risiko gagal bayar atau penurunan nilai pasar dapat terjadi. Oleh karena itu, kebijakan investasi jangka pendek harus disusun dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) serta memperhatikan faktor keamanan, likuiditas, dan profitabilitas secara seimbang.

Dalam konteks manajemen keuangan modern, investasi jangka pendek menjadi bagian integral dari strategi manajemen kas (*cash management*). Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan potensi keuntungan sekaligus menjaga stabilitas operasional dalam menghadapi dinamika ekonomi jangka pendek.

4.4 Pengungkapan dan Pelaporan

Pengungkapan dan pelaporan keuangan merupakan elemen penting dalam sistem pelaporan perusahaan yang bertujuan menyediakan informasi yang relevan, andal, dan transparan bagi para pemangku kepentingan. Dalam konteks tata kelola perusahaan

yang baik (*good corporate governance*), pengungkapan keuangan yang memadai membantu menciptakan kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas manajemen. Oleh karena itu, setiap entitas wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ditetapkan dalam *Standar Akuntansi Keuangan* (SAK).

4.4.1 Transparansi Informasi Keuangan

Transparansi dalam pelaporan keuangan mengacu pada penyajian informasi yang lengkap dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mencerminkan kondisi sebenarnya (*true and fair view*) agar para pengguna laporan, seperti investor, kreditur, dan regulator, dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat.

Pengungkapan terkait kas, piutang, dan investasi jangka pendek sangat penting karena pos-pos tersebut mencerminkan likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kas dan setara kas, misalnya, harus diungkapkan secara rinci mengenai komposisi, pembatasan penggunaan, serta kebijakan penilaian yang digunakan. Sementara itu, piutang perlu disajikan dengan pengungkapan mengenai kebijakan pencadangan kerugian dan penilaian risiko penagihan.

Prinsip keterbukaan ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik, di mana laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban internal, tetapi juga sebagai sarana komunikasi

antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal (Barth & Schipper, 2015).

4.4.2 Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

SAK mengharuskan entitas mengungkapkan secara jelas kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengakuan dan pengukuran aset keuangan, termasuk kas, piutang, dan investasi jangka pendek. Kebijakan akuntansi mencakup prosedur pengakuan pendapatan, penilaian aset, serta kebijakan penyisihan kerugian piutang.

Pengungkapan kebijakan ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dasar penyusunan dan perhitungan setiap akun dalam laporan keuangan. Misalnya, jika perusahaan menggunakan prosedur *amortized cost* untuk mengukur piutang, maka hal ini harus dijelaskan bersama asumsi yang digunakan, seperti tingkat diskonto dan estimasi masa penagihan.

Selain itu, SAK juga mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Transparansi dalam hal ini membantu menjaga konsistensi dan komparabilitas laporan keuangan antarperiode, serta meningkatkan kredibilitas pelaporan perusahaan (De George et al., 2016).

4.4.3 Pengungkapan Risiko Kredit dan Likuiditas

Selain informasi mengenai aset keuangan, perusahaan juga wajib mengungkapkan risiko yang mungkin timbul dari pengelolaan aset tersebut. Dua risiko utama yang perlu diungkapkan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit berkaitan dengan

kemungkinan kerugian akibat ketidakmampuan pihak lain memenuhi kewajiban kontraktualnya. Pengungkapan risiko kredit meliputi kebijakan manajemen risiko, batas eksposur maksimum, serta evaluasi terhadap kualitas piutang.

Sementara itu, risiko likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Pengungkapan risiko likuiditas biasanya mencakup jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan, kebijakan manajemen kas, serta sumber pendanaan alternatif yang tersedia.

Dengan menyajikan informasi risiko secara komprehensif, perusahaan dapat membantu pengguna laporan keuangan memahami profil risiko yang dihadapi dan menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan.

4.4.4 Relevansi Pengungkapan dalam Penilaian Kinerja Perusahaan

Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan berperan penting dalam membantu investor dan analis menilai kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan yang tidak memadai dapat menimbulkan asimetri informasi, yang berpotensi mengurangi kepercayaan pasar dan meningkatkan risiko investasi. Oleh karena itu, kualitas pengungkapan sering kali dijadikan indikator transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam praktiknya, entitas yang menerapkan pengungkapan sesuai dengan standar internasional cenderung memiliki reputasi lebih baik di mata investor dan lembaga keuangan. Selain itu, transparansi pengungkapan juga mendukung tujuan jangka panjang

perusahaan untuk menciptakan nilai berkelanjutan dan memperkuat integritas pelaporan keuangan.

Dengan demikian, pengungkapan dan pelaporan keuangan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen etis perusahaan untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangannya.

4.5 Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian kas dan setara kas serta berikan contohnya.
2. Apa saja kebijakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengelola piutang usaha?
3. Sebutkan tujuan utama perusahaan dalam melakukan investasi jangka pendek.
4. Jelaskan bagaimana prosedur cadangan kerugian piutang diterapkan.
5. Mengapa pengungkapan risiko kredit penting dalam laporan keuangan?

Bab 5: Persediaan dan Penilaian Aset Lancar

5.1 Pengertian Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset lancar terpenting dalam perusahaan karena secara langsung berkaitan dengan kegiatan operasional dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar. Dalam konteks akuntansi dan manajemen, persediaan diartikan sebagai aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, atau dalam bentuk bahan yang akan digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Persediaan mencakup tiga kategori utama, yaitu bahan baku (*raw materials*), barang dalam proses (*work in process*), dan barang jadi (*finished goods*). Ketiga komponen tersebut merupakan bagian integral dari siklus produksi dan memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi biaya serta profitabilitas perusahaan (Kieso et al., 2019).

Dalam perusahaan manufaktur, bahan baku merupakan input utama yang diolah menjadi produk jadi. Barang dalam proses menggambarkan tahap pertengahan di mana bahan baku telah melalui sebagian proses produksi tetapi belum menjadi produk akhir, sedangkan barang jadi adalah hasil akhir yang siap dijual kepada konsumen. Perusahaan dagang umumnya hanya memiliki satu jenis

persediaan, yaitu barang dagangan yang dibeli dalam kondisi siap jual. Sementara itu, pada perusahaan jasa, persediaan cenderung tidak berwujud karena kegiatan operasionalnya lebih menekankan pada pelayanan, meskipun beberapa perusahaan jasa tetap memiliki perlengkapan dan bahan habis pakai yang digunakan dalam kegiatan operasional.

Pengelolaan persediaan yang baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan operasional. Apabila perusahaan memiliki persediaan yang terlalu besar, dana perusahaan akan terikat pada aset yang tidak produktif dan meningkatkan biaya penyimpanan, risiko kerusakan, serta penurunan nilai. Sebaliknya, apabila persediaan terlalu sedikit, perusahaan berpotensi kehilangan peluang penjualan dan mengalami gangguan produksi karena kekurangan bahan baku. Oleh karena itu, manajemen harus mampu menentukan tingkat persediaan optimal dengan mempertimbangkan permintaan pasar, waktu pemesanan, dan kapasitas penyimpanan.

Dalam praktik manajemen modern, perusahaan menggunakan berbagai prosedur dan sistem untuk mengelola persediaan secara efisien. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah *Economic Order Quantity* (EOQ), yang membantu menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis dengan menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Selain itu, konsep *Just in Time* (JIT) juga diterapkan untuk meminimalkan jumlah persediaan dengan cara memesan bahan baku hanya saat dibutuhkan dalam proses produksi. Teknik ini bertujuan untuk

mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, namun membutuhkan sistem logistik dan rantai pasok yang sangat andal (Horngren et al., 2018).

Dari sisi akuntansi, persediaan memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan laba perusahaan karena memengaruhi perhitungan harga pokok penjualan (HPP). Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, nilai persediaan dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*net realizable value*), mana yang lebih rendah. Penilaian biaya persediaan dapat dilakukan dengan berbagai prosedur seperti *First In, First Out* (FIFO), *Last In, First Out* (LIFO), dan *Weighted Average Cost Method*. Pemilihan prosedur penilaian yang tepat harus disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan kondisi pasar, karena prosedur tersebut dapat memengaruhi nilai aset dan laba bersih yang dilaporkan.

Selain pengendalian internal, penerapan teknologi juga memegang peran besar dalam pengelolaan persediaan modern. Penggunaan sistem berbasis digital seperti *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan *Inventory Management Systems* memungkinkan perusahaan untuk memantau arus barang secara real-time, mengoptimalkan proses pembelian, serta menghindari kesalahan pencatatan. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat melakukan analisis permintaan, peramalan stok, dan pengendalian biaya secara lebih akurat.

Dengan demikian, persediaan bukan sekadar aset yang berwujud dalam bentuk barang, melainkan juga instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan usaha dan daya saing perusahaan.

Pengelolaan persediaan yang efektif memungkinkan perusahaan mencapai efisiensi biaya, stabilitas operasional, serta kepuasan pelanggan yang optimal. Oleh karena itu, setiap organisasi bisnis perlu mengembangkan sistem manajemen persediaan yang adaptif terhadap perubahan pasar dan perkembangan teknologi untuk memastikan keberlanjutan serta profitabilitas jangka panjang.

5.2 Jenis dan Klasifikasi Persediaan

Persediaan merupakan salah satu komponen penting dalam aset lancar perusahaan yang berperan besar dalam menjaga kelancaran kegiatan operasional dan penentuan laba. Dalam konteks akuntansi, persediaan mencerminkan investasi perusahaan pada barang yang dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Pengelolaan persediaan yang baik memastikan keseimbangan antara ketersediaan barang dan efisiensi biaya penyimpanan. Jenis serta klasifikasi persediaan berbeda tergantung pada karakteristik usaha, sehingga penting bagi setiap perusahaan untuk memahami struktur dan perlakuan akuntansi yang sesuai.

5.2.1 Persediaan dalam Perusahaan Dagang

Dalam perusahaan dagang, persediaan yang dimiliki umumnya hanya berupa **barang dagangan** (*merchandise inventory*), yaitu barang yang dibeli untuk dijual kembali tanpa melalui proses produksi. Persediaan ini menjadi aset utama yang secara langsung memengaruhi pendapatan dan laba perusahaan.

Proses akuntansi persediaan di perusahaan dagang melibatkan pencatatan pembelian, penjualan, serta penyesuaian terhadap barang yang tersisa pada akhir periode. Perusahaan dapat menggunakan dua sistem pencatatan, yaitu **prosedur periodik** dan **prosedur perpetual**.

1. **Prosedur periodik** mencatat persediaan hanya pada akhir periode melalui perhitungan fisik.
2. **Prosedur perpetual** mencatat setiap transaksi secara langsung dalam akun persediaan menggunakan teknologi *point of sale* atau sistem akuntansi komputerisasi.

Prosedur perpetual lebih umum digunakan saat ini karena memberikan informasi real-time mengenai jumlah dan nilai persediaan.

5.2.2 Persediaan dalam Perusahaan Manufaktur

Berbeda dengan perusahaan dagang, **perusahaan manufaktur** memiliki proses produksi yang lebih kompleks dan, oleh karena itu, memiliki tiga jenis utama persediaan:

1. **Persediaan bahan baku (*raw materials inventory*)** — mencakup bahan utama yang digunakan dalam proses produksi, seperti logam, kain, atau bahan kimia.
2. **Persediaan barang dalam proses (*work in process inventory*)** — terdiri atas barang yang sedang dikerjakan, namun belum selesai menjadi produk akhir. Nilainya mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.

3. **Persediaan barang jadi (*finished goods inventory*)** — merupakan hasil akhir produksi yang siap untuk dijual kepada konsumen atau distributor.

Klasifikasi ini penting karena masing-masing jenis persediaan memiliki prosedur penilaian dan pengendalian yang berbeda. Misalnya, bahan baku perlu dikelola agar tidak terjadi kelebihan stok, sedangkan barang dalam proses memerlukan perhitungan biaya produksi yang akurat. Menurut Garrison et al. (2021), manajemen persediaan yang efisien di sektor manufaktur berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan profitabilitas perusahaan.

5.2.3 Persediaan dalam Perusahaan Jasa

Berbeda dengan dua jenis usaha sebelumnya, **perusahaan jasa** umumnya tidak memiliki persediaan fisik karena tidak menjual produk berwujud. Namun, beberapa perusahaan jasa tetap memiliki **persediaan perlengkapan operasional (*supplies inventory*)** yang digunakan dalam memberikan layanan. Contohnya, perusahaan perhotelan memiliki perlengkapan seperti linen, perlengkapan mandi, atau bahan pembersih; sementara klinik kesehatan memiliki obat-obatan dan alat medis yang tergolong dalam persediaan.

Dalam laporan keuangan, persediaan perlengkapan biasanya dicatat sebagai aset lancar dan dibebankan sebagai biaya ketika digunakan. Walaupun jumlahnya relatif kecil dibandingkan perusahaan dagang dan manufaktur, pengendalian terhadap persediaan perlengkapan tetap penting agar efisiensi operasional dapat terjaga.

5.2.4 Klasifikasi Persediaan Berdasarkan Fungsi dan Akuntansi

Selain berdasarkan jenis usaha, persediaan juga dapat diklasifikasikan menurut fungsi dan perlakuan akuntansinya:

1. Berdasarkan fungsi, persediaan dibagi menjadi bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi.
2. Berdasarkan perlakuan akuntansi, persediaan dapat dinilai menggunakan beberapa prosedur seperti:
 - FIFO (*First In, First Out*) – barang yang pertama masuk diasumsikan dijual terlebih dahulu.
 - LIFO (*Last In, First Out*) – barang yang terakhir masuk dianggap dijual terlebih dahulu.
 - *Average Cost Method* – nilai persediaan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya perolehan.

Pemilihan prosedur penilaian persediaan akan memengaruhi laporan laba rugi dan neraca, khususnya dalam penentuan harga pokok penjualan (*cost of goods sold*). Oleh karena itu, kebijakan penilaian persediaan harus disesuaikan dengan karakteristik usaha dan regulasi akuntansi yang berlaku (Weygandt et al., 2020).

5.2.5 Pentingnya Klasifikasi dalam Pengendalian Persediaan

Klasifikasi persediaan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan pencatatan, penilaian, dan pengawasan yang berbeda sesuai jenis kegiatan usahanya. Dengan klasifikasi yang jelas, perusahaan dapat:

1. Menentukan prosedur akuntansi yang paling relevan;
2. Mengoptimalkan perputaran persediaan (*inventory turnover*);

3. Mencegah pemborosan dan kehilangan aset;
4. Memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan andal.

Pengendalian internal terhadap persediaan, termasuk audit fisik secara berkala dan penggunaan sistem digital, menjadi langkah penting untuk menjaga efisiensi dan transparansi dalam manajemen persediaan.

5.3 Prosedur Penilaian Persediaan

Penilaian persediaan merupakan salah satu aspek penting dalam akuntansi karena secara langsung memengaruhi laporan keuangan, khususnya nilai aset pada neraca dan harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) pada laporan laba rugi. Penentuan prosedur penilaian persediaan yang tepat sangat penting untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles* atau *GAAP*). Selain itu, prosedur penilaian juga berpengaruh terhadap laba bersih, pajak, dan pengambilan keputusan manajerial.

5.3.1 Pentingnya dan Prinsip Penilaian Persediaan

Tujuan utama dari penilaian persediaan adalah menentukan nilai wajar barang dagang yang masih dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi. Nilai tersebut digunakan untuk menghitung total aset lancar dan menentukan harga pokok penjualan (HPP). Prinsip dasar dalam penilaian persediaan adalah *prudence* (kehati-hatian) dan *matching principle*, yaitu mencocokkan antara

pendapatan dan biaya pada periode yang sama (Horngren et al., 2021).

Prosedur yang dipilih harus konsisten dari satu periode ke periode berikutnya untuk menjaga keterbandingan laporan keuangan (*consistency principle*). Namun, dalam kondisi ekonomi tertentu, perusahaan dapat mengubah prosedur jika terbukti memberikan representasi yang lebih andal terhadap nilai persediaan.

5.3.2 Prosedur FIFO (*First In, First Out*)

Prosedur FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi adalah barang yang pertama kali dijual. Dengan demikian, persediaan akhir terdiri dari barang yang dibeli atau diproduksi terakhir. Dalam kondisi inflasi, prosedur FIFO cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dan harga pokok penjualan yang lebih rendah, sehingga laba bersih tampak lebih besar.

Kelebihan prosedur ini adalah kemudahan penerapan dan relevansi terhadap kondisi fisik barang yang biasanya dijual berdasarkan urutan masuknya. Namun, kelemahannya adalah potensi distorsi laba dalam periode inflasi karena peningkatan nilai barang yang belum dijual (Weygandt et al., 2020).

5.3.3 Prosedur LIFO (*Last In, First Out*)

Berbeda dengan FIFO, prosedur LIFO mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli atau diproduksi adalah yang pertama kali dijual. Dengan demikian, persediaan akhir terdiri dari barang lama. Dalam situasi inflasi, LIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dan laba bersih yang lebih rendah

dibanding FIFO, karena barang yang dijual memiliki biaya yang lebih tinggi.

Prosedur ini sering digunakan untuk tujuan perpajakan karena laba yang lebih rendah dapat mengurangi beban pajak. Namun, LIFO tidak diperkenankan dalam pelaporan keuangan internasional berdasarkan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), karena dianggap tidak mencerminkan nilai ekonomi aktual dari persediaan (Schroeder et al., 2022).

5.3.4 Prosedur Rata-Rata (*Weighted Average Method*)

Prosedur rata-rata menggunakan teknik perhitungan harga pokok per unit berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh pembelian persediaan selama periode tertentu. Rumus umum prosedur ini adalah:

$$\text{Harga Pokok Rata - Rata per Unit} = \frac{\text{Total Biaya Persediaan}}{\text{Jumlah Unit Persediaan}}$$

Prosedur ini dianggap lebih stabil karena mengurangi pengaruh fluktuasi harga terhadap laba. Oleh karena itu, banyak perusahaan manufaktur menggunakan prosedur rata-rata untuk menjaga kestabilan laporan keuangan. Kelebihannya adalah kemudahan penerapan dan hasil yang tidak terlalu ekstrem dibandingkan FIFO atau LIFO. Namun, prosedur ini dapat mengaburkan tren harga sebenarnya jika terjadi perubahan harga yang tajam.

5.3.5 Prosedur Identifikasi Spesifik

Prosedur identifikasi spesifik digunakan untuk barang-barang dengan nilai tinggi, unik, atau tidak dapat dipertukarkan,

seperti kendaraan bermotor, perhiasan, atau alat berat. Dalam prosedur ini, setiap unit barang diberi identifikasi khusus dan dicatat berdasarkan harga perolehannya masing-masing.

Prosedur ini menghasilkan tingkat akurasi tinggi karena setiap barang dicatat berdasarkan biaya aktualnya. Namun, penerapannya terbatas pada jenis barang yang tidak homogen dan dalam jumlah terbatas. Penggunaan prosedur ini memerlukan sistem pencatatan yang rinci agar dapat menghindari kesalahan identifikasi nilai persediaan.

5.3.6 Implikasi Prosedur Penilaian terhadap Laporan Keuangan

Pemilihan prosedur penilaian persediaan memiliki implikasi penting terhadap laba bersih, total aset, dan rasio keuangan perusahaan. Misalnya, prosedur FIFO meningkatkan laba bersih selama inflasi, yang dapat menarik investor, tetapi juga meningkatkan beban pajak. Sebaliknya, prosedur LIFO menurunkan laba bersih dan pajak, namun memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai biaya penggantian barang dagang.

Manajer keuangan harus mempertimbangkan faktor stabilitas harga, tujuan pelaporan, serta ketentuan perpajakan sebelum menentukan prosedur yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Dalam konteks IFRS, prosedur FIFO dan rata-rata lebih umum digunakan karena dianggap paling mencerminkan nilai ekonomi riil persediaan.

5.4 Penurunan Nilai dan Pelaporan Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset lancar yang memiliki peranan penting dalam menentukan posisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Nilai persediaan yang tercatat dalam laporan keuangan harus mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan secara wajar sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*). Oleh karena itu, apabila nilai realisasi bersih (*net realizable value* atau NRV) persediaan lebih rendah dibandingkan dengan biaya perolehannya, maka perusahaan wajib melakukan penurunan nilai (*write down*) dan mengakuinya sebagai beban pada periode berjalan. Praktik ini bertujuan untuk menjaga agar laporan keuangan menyajikan kondisi keuangan yang wajar dan tidak melebihkan nilai aset perusahaan.

5.4.1 Prinsip Penilaian Persediaan

Penilaian persediaan didasarkan pada prinsip bahwa aset harus dilaporkan sebesar nilai yang dapat direalisasikan atau digunakan dalam operasi normal. Berdasarkan *Standar Akuntansi Keuangan* (SAK) — khususnya PSAK 14 tentang Persediaan — persediaan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih.

Biaya perolehan mencakup seluruh biaya yang timbul hingga persediaan siap digunakan atau dijual, seperti biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang relevan. Sedangkan nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dikurangi dengan biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Ketika harga pasar turun atau

barang mengalami penurunan kualitas, nilai realisasi bersih menjadi lebih rendah daripada biaya perolehan, sehingga penurunan nilai harus diakui.

Teknik ini sejalan dengan prinsip *conservatism* dalam akuntansi, yaitu menghindari pengakuan laba sebelum terealisasi dan segera mengakui potensi kerugian ketika terdapat indikasi penurunan nilai (Alexander & Nobes, 2020).

5.4.2 Pengakuan Penurunan Nilai (*Write Down*)

Penurunan nilai persediaan terjadi ketika nilai realisasi bersih lebih rendah dari biaya perolehan. Selisih antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih diakui sebagai beban penurunan nilai pada laporan laba rugi periode yang bersangkutan. Beban ini mencerminkan kerugian akibat penurunan nilai ekonomi dari persediaan, baik karena penurunan harga pasar, kerusakan fisik, atau keusangan barang.

Jika di kemudian hari nilai realisasi bersih meningkat, maka sebagian atau seluruh penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya dapat dipulihkan (*reversal of write down*), sepanjang tidak melebihi biaya perolehan awal. Namun, kebijakan pemulihan nilai ini harus diungkapkan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

Prinsip pengakuan ini memastikan bahwa laporan keuangan tidak menampilkan nilai aset yang lebih tinggi daripada manfaat ekonomis yang sebenarnya dapat diperoleh dari persediaan.

5.4.3 Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Transparansi pengungkapan merupakan aspek penting dalam pelaporan persediaan. SAK mengharuskan perusahaan

mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk:

1. Dasar penilaian persediaan (misalnya *FIFO*, *LIFO*, atau *weighted average*).
2. Kebijakan pengakuan penurunan nilai dan prosedur perhitungannya.
3. Jumlah nilai tercatat persediaan setelah penurunan nilai.
4. Perubahan signifikan dalam saldo persediaan selama periode berjalan, seperti akibat kerusakan, penjualan besar-besaran, atau pergeseran strategi produksi.

Selain itu, perusahaan juga wajib mengungkapkan estimasi dan asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai realisasi bersih, karena faktor-faktor ini dapat memengaruhi keandalan informasi keuangan. Pengungkapan ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tetapi juga membantu pengguna laporan dalam menilai risiko operasional perusahaan (Wagenhofer, 2016).

5.4.4 Dampak Penurunan Nilai terhadap Kinerja Keuangan

Penurunan nilai persediaan berdampak langsung terhadap laba bersih perusahaan karena beban yang diakui akan mengurangi keuntungan periode berjalan. Namun, langkah ini penting untuk menjaga akurasi pelaporan dan mencerminkan kondisi keuangan secara realistis. Dengan menerapkan prinsip pengakuan yang tepat, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Lebih jauh, pengungkapan penurunan nilai juga berfungsi sebagai sinyal bagi investor dan kreditur untuk menilai efektivitas manajemen dalam mengelola aset lancar. Ketepatan dan kejujuran dalam pengungkapan menunjukkan integritas manajemen serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap laporan keuangan perusahaan.

Dengan demikian, kebijakan penurunan nilai persediaan bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi akuntansi, tetapi juga merupakan cerminan dari prinsip tanggung jawab dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

5.5 Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian persediaan menurut Standar Akuntansi Keuangan.
2. Apa perbedaan persediaan pada perusahaan dagang dan manufaktur?
3. Sebutkan empat prosedur penilaian persediaan yang umum digunakan.
4. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap penurunan nilai persediaan?
5. Mengapa pengungkapan prosedur penilaian persediaan penting dalam laporan keuangan?

Bab 6: Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

6.1 Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap

6.1.1 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam operasionalnya, bukan untuk dijual dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Aset ini memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dan berfungsi untuk mendukung produksi atau penyediaan jasa, sekaligus membantu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan.

Contoh aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Keberadaan aset ini penting untuk keberlanjutan operasional perusahaan karena mendukung kapasitas produksi dan kualitas layanan.

6.1.2 Karakteristik Utama Aset Tetap

Aset tetap memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis aset lain, antara lain:

1. **Penggunaan jangka panjang:** aset dimanfaatkan selama beberapa tahun untuk operasi bisnis, tidak untuk dijual sebagai barang dagangan.
2. **Bentuk fisik yang nyata:** aset dapat dilihat dan diukur secara fisik, seperti mesin, bangunan, dan peralatan.

3. **Kontribusi terhadap proses produksi:** aset tetap berperan dalam menghasilkan barang atau jasa, sehingga mendukung pencapaian tujuan bisnis dan pendapatan perusahaan.

Karakteristik ini penting bagi manajemen dan akuntan untuk pengelolaan, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan yang akurat. Pemahaman terhadap aset tetap membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi, penentuan depresiasi, dan penilaian nilai aset secara tepat.

6.1.3 Implikasi Manajerial

Manajemen aset tetap mencakup pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Keputusan terkait aset tetap harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan, biaya pemeliharaan, dan potensi manfaat ekonomi di masa depan. Pemeliharaan yang baik memastikan aset tetap berfungsi optimal, sementara penghapusan atau penggantian aset dilakukan ketika umur ekonomisnya habis atau aset tidak lagi mendukung operasi.

Dengan memahami pengertian dan karakteristik aset tetap, perusahaan dapat mengelola sumber daya fisik secara efektif, memaksimalkan keuntungan, dan memastikan keberlanjutan operasional jangka panjang.

6.2 Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Pengakuan dan pengukuran aset tetap merupakan prinsip fundamental dalam akuntansi keuangan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), khususnya PSAK 16. Aset tetap diakui

ketika manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan aset tersebut dapat dipastikan akan diperoleh oleh entitas, serta biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Kriteria ini menegaskan bahwa tidak semua aset yang dimiliki entitas otomatis dicatat sebagai aset tetap; hanya aset yang memberikan kontribusi ekonomi di masa depan dan memiliki biaya perolehan yang dapat diukur secara objektif yang memenuhi syarat pengakuan. Proses pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara wajar dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2016).

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya, yang mencakup harga pembelian, biaya impor, pajak yang tidak dapat dikreditkan, biaya transportasi, instalasi, serta biaya lain yang secara langsung dapat dikaitkan dengan aset tersebut agar aset siap digunakan sesuai tujuan manajemen. Biaya perolehan ini tidak termasuk biaya operasional sehari-hari atau biaya pemeliharaan rutin, yang dicatat sebagai beban saat terjadi. Pengukuran awal yang akurat menjadi dasar penting untuk penyusunan laporan keuangan yang valid dan memudahkan evaluasi kinerja aset serta pengambilan keputusan manajerial terkait investasi dan pengelolaan sumber daya.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dapat diukur menggunakan dua teknik utama sesuai PSAK 16, yaitu model biaya (*cost model*) dan model revaluasi (*revaluation model*). Model biaya menetapkan nilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dikurangi

akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Teknik ini sederhana dan mudah diterapkan, serta memberikan stabilitas laporan keuangan, terutama bagi entitas yang asetnya tidak memiliki fluktuasi nilai pasar signifikan. Sebaliknya, model revaluasi menilai aset tetap pada nilai wajar yang ditentukan pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal tersebut. Model ini lebih mencerminkan nilai ekonomi aset di pasar saat ini, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih relevan bagi investor dan pemangku kepentingan mengenai posisi keuangan entitas.

Penerapan pengukuran ini memiliki implikasi signifikan terhadap laporan keuangan dan pengambilan keputusan manajerial. Misalnya, pemilihan model revaluasi dapat meningkatkan nilai tercatat aset dalam neraca dan memperkuat struktur permodalan, sedangkan model biaya memberikan konservatisme dalam pelaporan keuangan. Penyusutan aset tetap, baik menggunakan prosedur garis lurus, saldo menurun, atau unit produksi, juga mempengaruhi beban depresiasi yang dicatat dalam laporan laba rugi, sehingga berdampak pada profitabilitas dan pengelolaan pajak perusahaan. Pemahaman prinsip pengakuan dan pengukuran aset tetap memungkinkan manajemen dan akuntan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, mematuhi standar akuntansi, serta menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran aset tetap merupakan proses kritis yang memastikan bahwa aset yang dimiliki

entitas diakui secara tepat dan diukur secara andal. Penerapan model biaya atau revaluasi memberikan fleksibilitas dalam menyajikan nilai aset sesuai karakteristik dan tujuan pelaporan, sambil tetap mematuhi prinsip PSAK 16. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga mendukung manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengoptimalkan penggunaan aset tetap untuk mencapai tujuan operasional dan strategis entitas.

6.3 Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap

6.3.1 Konsep Penyusutan

Penyusutan adalah proses alokasi sistematis biaya perolehan aset tetap selama umur manfaatnya. Tujuan penyusutan adalah mencerminkan penggunaan aset dalam operasi perusahaan dan membagi biaya aset ke laporan laba rugi secara proporsional. Penyusutan tidak menggambarkan arus kas, tetapi mempengaruhi perhitungan laba bersih dan nilai buku aset.

6.3.2 Prosedur Penyusutan

Beberapa prosedur penyusutan yang umum digunakan antara lain:

1. **Prosedur Garis Lurus (*Straight Line*):** Biaya aset dibagi sama rata selama umur manfaatnya. Cocok untuk aset yang digunakan secara konsisten setiap periode.
2. **Prosedur Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance*):** Prosedur percepatan yang mengalokasikan biaya

lebih besar pada awal umur aset dan menurun seiring waktu. Digunakan untuk aset yang nilainya cepat menurun atau teknologinya cepat usang.

3. **Prosedur Unit Produksi (*Unit of Production*):** Penyusutan dihitung berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan atau digunakan. Cocok untuk aset yang kinerjanya bergantung pada volume produksi.

6.3.3 Penurunan Nilai Aset (*Impairment*)

Selain penyusutan, perusahaan wajib menilai apakah terjadi penurunan nilai aset. *Impairment* terjadi ketika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan (*recoverable amount*). Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi periode berjalan, sehingga mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara lebih realistis.

6.3.4 Implikasi Akuntansi dan Manajemen

Pemahaman penyusutan dan penurunan nilai aset tetap membantu perusahaan untuk:

1. Menyajikan laporan keuangan yang wajar dan sesuai prinsip akuntansi.
2. Mengatur strategi perawatan dan penggantian aset agar biaya operasional efisien.
3. Mengambil keputusan investasi yang tepat berdasarkan nilai aset bersih dan umur manfaat.

Dengan penerapan yang tepat, penyusutan dan penurunan nilai aset tetap mendukung transparansi laporan keuangan,

manajemen risiko aset, dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

6.4 Pengertian dan Karakteristik Aset Tak Berwujud

6.4.1 Definisi Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya mencakup hak cipta, paten, merek dagang, lisensi, dan perangkat lunak. Meskipun tidak terlihat secara fisik, aset ini memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat finansial bagi perusahaan di masa depan. Aset tak berwujud memainkan peran penting dalam mendukung keunggulan kompetitif, inovasi, dan pertumbuhan bisnis (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019).

6.4.2 Karakteristik Utama Aset Tak Berwujud

Untuk dikategorikan sebagai aset tak berwujud, sebuah aset harus memenuhi kriteria berikut:

1. **Dapat Diidentifikasi.** Aset harus dapat dibedakan dari aset lainnya dan diakui secara terpisah.
2. **Kendali Entitas.** Perusahaan memiliki hak atau kontrol untuk menggunakan aset tersebut dan membatasi akses pihak lain.
3. **Manfaat Ekonomi Masa Depan.** Aset diharapkan menghasilkan keuntungan, penghematan biaya, atau arus kas positif di masa depan.

Karakteristik ini membedakan aset tak berwujud dari aset fisik dan menekankan pentingnya penilaian yang akurat serta perlakuan akuntansi yang sesuai.

6.4.3 Implikasi dalam Manajemen dan Akuntansi

Aset tak berwujud memerlukan pengelolaan khusus untuk memastikan manfaat ekonomi optimal, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta atau paten, pemeliharaan merek dagang, dan pembaruan lisensi. Dalam akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan amortisasi aset tak berwujud harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya.

Pemahaman yang baik tentang aset tak berwujud membantu manajemen membuat keputusan investasi strategis, melindungi kekayaan intelektual, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar.

6.5 Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara aset tetap dan aset tak berwujud!
2. Sebutkan contoh aset tetap dan jelaskan bagaimana pengakuannya dalam laporan keuangan!
3. Apa tujuan penyusutan aset tetap dan prosedur apa saja yang umum digunakan?
4. Jelaskan kriteria pengakuan aset tak berwujud menurut PSAK 19!

5. Apa yang dimaksud dengan penurunan nilai aset dan bagaimana perlakuannya dalam akuntansi?

Bab 7: Kewajiban Jangka Pendek dan Panjang

7.1 Pengertian dan Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban (*liabilities*) merupakan salah satu elemen fundamental dalam akuntansi keuangan yang mencerminkan utang atau tanggung jawab ekonomi yang harus dipenuhi oleh entitas akibat peristiwa masa lalu. Secara prinsip, kewajiban mengindikasikan adanya pengalihan sumber daya ekonomi, seperti kas atau aset lainnya, kepada pihak ketiga di masa depan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pemahaman yang tepat mengenai konsep kewajiban sangat penting bagi penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan, karena kewajiban mencerminkan risiko finansial dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi komitmen keuangannya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019).

Dalam praktik akuntansi, kewajiban dibedakan berdasarkan jangka waktu penyelesaian dan sifatnya, menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. **Kewajiban jangka pendek** adalah utang yang harus diselesaikan dalam periode satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih lama. Contohnya mencakup utang usaha, wesel bayar, dan beban akrual. Utang usaha biasanya timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit,

sedangkan wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Beban akrual mencerminkan kewajiban yang telah terjadi tetapi belum dibayarkan, seperti gaji karyawan, bunga pinjaman, dan pajak yang masih harus dibayar. Kewajiban jangka pendek penting dalam menilai likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2014).

Sebaliknya, **kewajiban jangka panjang** adalah utang yang penyelesaiannya dijadwalkan lebih dari satu tahun atau siklus operasi normal. Jenis kewajiban ini mencakup obligasi, pinjaman bank jangka panjang, dan kewajiban pensiun. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor dengan janji pembayaran bunga dan pokok pada tanggal tertentu. Pinjaman bank jangka panjang mencakup fasilitas kredit yang diperoleh dari lembaga keuangan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Sementara itu, kewajiban pensiun muncul sebagai komitmen perusahaan untuk membayar manfaat pensiun kepada karyawan di masa depan, dan sering kali memerlukan perhitungan aktuarial untuk menentukan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi kewajiban ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai struktur keuangan perusahaan, risiko likuiditas, dan solvabilitas. Dengan memahami pengertian dan klasifikasi kewajiban, manajemen dapat merencanakan strategi

pengelolaan utang yang efektif serta memastikan keberlanjutan operasional dan akuntabilitas terhadap kreditur dan investor.

7.2 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek (*current liabilities*) merupakan komponen penting dalam struktur modal kerja perusahaan dan menekankan tanggung jawab finansial yang harus diselesaikan dalam periode yang relatif singkat, biasanya kurang dari satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Pengelolaan kewajiban jangka pendek yang efektif berperan dalam menjaga likuiditas perusahaan, meminimalkan risiko gagal bayar, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

7.2.1 Definisi dan Karakteristik Kewajiban Jangka Pendek

Secara konsep, kewajiban jangka pendek adalah utang atau kewajiban yang timbul dari transaksi bisnis dan diharapkan diselesaikan dalam waktu singkat. Contoh utama meliputi **utang dagang** (*accounts payable*), yaitu kewajiban perusahaan kepada pemasok atas barang atau jasa yang telah diterima; **utang bunga**, yang timbul dari pinjaman jangka pendek; dan **kewajiban pajak**, yang mencakup pajak penghasilan, PPN, atau kontribusi lainnya yang harus dibayarkan dalam periode berjalan.

Karakteristik utama kewajiban jangka pendek meliputi jangka waktu penyelesaian yang singkat, kepastian jumlah nominal utang, serta ekspektasi penyelesaian melalui penggunaan aset lancar perusahaan, seperti kas atau piutang usaha (White et al., 2021).

7.2.2 Manajemen Likuiditas dan Risiko

Pengelolaan kewajiban jangka pendek menuntut perhatian pada likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial tepat waktu. Likuiditas yang memadai mengurangi risiko gagal bayar (*default risk*) yang dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan biaya tambahan seperti denda atau bunga keterlambatan.

Strategi manajemen kewajiban jangka pendek mencakup pengaturan jadwal pembayaran yang efisien, penggunaan pinjaman jangka pendek secara strategis, serta pemantauan kas dan arus kas masuk untuk memastikan bahwa dana tersedia saat jatuh tempo. Pengawasan ini juga memungkinkan perusahaan memanfaatkan diskon pembayaran awal dari pemasok, sehingga meningkatkan efisiensi operasional.

7.2.3 Pengungkapan dan Kepatuhan Laporan Keuangan

Transparansi pengungkapan kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Informasi mengenai komposisi, jumlah, dan jatuh tempo kewajiban memberikan gambaran jelas mengenai risiko likuiditas dan kesehatan finansial perusahaan.

Standar akuntansi internasional, seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), menekankan pengungkapan kewajiban jangka pendek secara rinci, termasuk klasifikasi, catatan tambahan terkait utang kontinjensi, serta dampaknya terhadap arus

kas. Kepatuhan terhadap standar ini tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga memperkuat kredibilitas perusahaan di mata investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya (Kieso et al., 2020).

7.2.4 Implikasi Praktis bagi Manajemen Perusahaan

Pemahaman yang tepat mengenai kewajiban jangka pendek memungkinkan manajemen mengambil keputusan strategis terkait modal kerja, perencanaan arus kas, dan pengelolaan risiko. Perusahaan yang mampu menyusun prioritas pembayaran dan mengoptimalkan penggunaan aset lancar akan lebih stabil secara finansial, dapat memanfaatkan peluang bisnis, serta menjaga hubungan baik dengan pemasok dan kreditor.

Selain itu, pemisahan yang jelas antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang membantu perusahaan merencanakan strategi pendanaan jangka panjang dan menghindari likuiditas tertekan, sehingga memastikan keberlanjutan operasional yang sehat.

7.3 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan elemen penting dalam struktur keuangan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan proyek berskala besar. Kewajiban ini memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun dan mencerminkan komitmen keuangan jangka panjang yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko terhadap likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Dalam konteks

akuntansi modern, pengakuan dan pengukuran kewajiban jangka panjang harus mengikuti standar internasional seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) maupun ketentuan nasional seperti *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) 71 yang mengatur instrumen keuangan.

7.3.1 Jenis dan Karakteristik Kewajiban Jangka Panjang

Secara umum, kewajiban jangka panjang mencakup beberapa bentuk instrumen keuangan seperti obligasi, pinjaman jangka panjang, dan utang hipotek. Obligasi (*bonds payable*) merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari investor dengan imbal hasil berupa bunga tetap atau variabel. Instrumen ini sering digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur, ekspansi bisnis, atau penggantian aset tetap. Sementara itu, utang hipotek (*mortgage payable*) merupakan pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tertentu, seperti bangunan atau lahan, sehingga memberikan tingkat keamanan tambahan bagi kreditur.

Pinjaman jangka panjang lainnya biasanya berasal dari lembaga keuangan atau bank dengan ketentuan bunga dan jangka waktu tertentu. Setiap bentuk kewajiban memiliki risiko tersendiri yang harus diperhitungkan dalam strategi manajemen keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan portofolio kewajiban menjadi penting agar beban bunga dan risiko gagal bayar dapat diminimalkan (Brigham & Ehrhardt, 2019).

7.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Menurut PSAK 71 dan IFRS 9

Pengakuan kewajiban jangka panjang dilakukan ketika organisasi secara sah menjadi pihak yang memiliki kewajiban kontraktual terhadap pihak lain. Berdasarkan PSAK 71 dan IFRS 9, kewajiban harus diakui pada nilai wajar (*fair value*) saat transaksi awal, kemudian diukur menggunakan prosedur biaya diamortisasi (*amortized cost method*) atau nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*). Pemilihan prosedur pengukuran ini bergantung pada tujuan pengelolaan instrumen keuangan dan model bisnis perusahaan.

Selain pengakuan dan pengukuran, standar tersebut juga menekankan pentingnya pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan. Informasi seperti jadwal jatuh tempo, tingkat bunga, risiko kredit, serta kebijakan manajemen risiko harus diuraikan secara transparan. Transparansi ini membantu pemangku kepentingan menilai kesehatan keuangan dan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (IASB, 2014).

7.3.3 Implikasi Manajerial dan Strategi Pengelolaan

Dari sudut pandang manajerial, pengelolaan kewajiban jangka panjang memerlukan perencanaan yang matang untuk menjaga keseimbangan antara sumber pendanaan dan kemampuan pembayaran. Strategi yang dapat diterapkan meliputi pengaturan jadwal pembayaran bunga, diversifikasi sumber pembiayaan, serta manajemen risiko suku bunga dan nilai tukar. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan *matching principle* antara durasi kewajiban

dengan umur ekonomis aset yang dibiayai agar tercipta keselarasan dalam arus kas.

Pengelolaan kewajiban jangka panjang yang baik meningkatkan kredibilitas entitas di mata investor dan lembaga keuangan, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak efektif dapat menimbulkan beban bunga berlebih, mengurangi profitabilitas, dan meningkatkan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, kewajiban jangka panjang harus dipandang bukan sekadar sebagai beban finansial, tetapi sebagai alat strategis dalam pembiayaan jangka panjang yang dapat memperkuat posisi keuangan organisasi jika dikelola dengan baik.

7.4 Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Pengelolaan kewajiban perusahaan merupakan aspek penting dalam akuntansi keuangan yang berfokus pada akurasi, transparansi, dan relevansi informasi. Kewajiban mencerminkan komitmen perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan yang timbul dari transaksi atau peristiwa sebelumnya. Pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tepat membantu pemangku kepentingan memahami risiko finansial serta posisi likuiditas dan solvabilitas perusahaan.

7.4.1 Pengukuran Kewajiban

Pengukuran kewajiban dilakukan berdasarkan nilai kini (*present value*) dari kas atau sumber daya lain yang akan dibayarkan di masa depan. Teknik ini mempertimbangkan faktor waktu dan nilai

uang, sehingga kewajiban tercermin secara realistis dalam laporan keuangan. Prosedur *discounted cash flow* umumnya digunakan untuk menghitung nilai kini dari kewajiban jangka panjang, sementara kewajiban jangka pendek biasanya diukur berdasarkan nilai nominal atau estimasi pembayaran aktual (IFRS Foundation, 2019).

Penerapan pengukuran berbasis nilai kini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan estimasi realistis atas beban yang akan ditanggung perusahaan, meningkatkan akurasi prediksi arus kas keluar, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial.

7.4.2 Penyajian Kewajiban

Dalam laporan posisi keuangan, penyajian kewajiban harus memisahkan antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek mencakup kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan, sedangkan kewajiban jangka panjang mencakup kewajiban dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun. Pemisahan ini memberikan informasi yang lebih jelas mengenai likuiditas, kebutuhan modal kerja, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang (Kieso et al., 2019).

Penyajian yang sistematis memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam berbagai horizon waktu dan mengidentifikasi potensi risiko finansial.

7.4.3 Pengungkapan Kewajiban

Selain pengukuran dan penyajian, pengungkapan kewajiban secara transparan merupakan bagian penting dari praktik akuntansi yang baik. Perusahaan wajib menyampaikan rincian kewajiban, termasuk jadwal pembayaran, suku bunga, ketentuan kontrak, serta asumsi yang digunakan dalam perhitungan nilai kini. Pengungkapan ini memungkinkan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh gambaran realistis mengenai posisi keuangan perusahaan, memfasilitasi evaluasi risiko, dan mendukung pengambilan keputusan yang informatif (IFRS Foundation, 2019).

Transparansi informasi terkait kewajiban meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

7.5 Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang!
2. Sebutkan contoh kewajiban jangka pendek dan bagaimana pengakuannya dalam laporan keuangan!
3. Bagaimana pengaruh perubahan suku bunga terhadap nilai kini kewajiban jangka panjang?
4. Mengapa pengungkapan kewajiban penting bagi pemangku kepentingan?
5. Bagaimana peran PSAK 71 dalam pengukuran kewajiban keuangan?

Bab 8: Ekuitas dan Instrumen Keuangan

8.1 Pengertian Ekuitas dan Instrumen Keuangan

Ekuitas dalam konteks keuangan perusahaan merujuk pada klaim residu pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas mencerminkan nilai bersih yang dimiliki oleh pemegang saham atau pemilik atas suatu entitas. Ekuitas dapat terdiri atas beberapa komponen, seperti modal disetor, laba ditahan, serta unsur ekuitas lainnya yang muncul dari transaksi modal atau hasil revaluasi aset. Dalam laporan keuangan, ekuitas merupakan bagian penting dari neraca dan mencerminkan stabilitas serta posisi keuangan jangka panjang suatu entitas. Ekuitas tidak hanya menjadi indikator kekayaan pemilik, tetapi juga menjadi ukuran kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan.

Sementara itu, instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu pihak dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi pihak lain. Instrumen keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu instrumen keuangan ekuitas dan utang. Instrumen ekuitas seperti saham biasa dan saham preferen mewakili kepemilikan atas suatu

entitas dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima bagian dari laba dan aset perusahaan. Di sisi lain, instrumen utang seperti obligasi mencerminkan pinjaman yang harus dibayar kembali oleh penerbit kepada pemegangnya dalam jangka waktu tertentu beserta bunganya. Selain itu, terdapat pula instrumen derivatif seperti opsi, kontrak berjangka, dan swap, yang nilainya bergantung pada nilai dari aset dasar tertentu. Instrumen-instrumen ini memungkinkan manajer keuangan dan investor untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko, melakukan spekulasi, atau mengatur struktur modal secara strategis (Madura, 2021).

Dalam pasar keuangan global yang semakin kompleks, pemahaman terhadap berbagai jenis instrumen keuangan menjadi sangat penting, tidak hanya bagi investor dan pelaku pasar, tetapi juga bagi regulator dan analis keuangan. Pemilihan instrumen keuangan yang tepat berkaitan erat dengan manajemen risiko, struktur modal perusahaan, serta efisiensi pasar. Oleh karena itu, pengelolaan ekuitas dan instrumen keuangan harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas informasi, untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan.

8.2 Jenis-Jenis Ekuitas dan Instrumen Keuangan

8.2.1 Kategori Ekuitas: Saham Biasa dan Saham Preferen

Ekuitas merupakan bagian kepemilikan dalam suatu entitas bisnis yang menunjukkan klaim residual terhadap aset perusahaan setelah kewajiban diselesaikan. Terdapat dua bentuk utama ekuitas, yaitu *common stock* (saham biasa) dan *preferred stock* (saham preferen).

Saham biasa memberikan hak suara kepada pemegangnya dalam rapat umum pemegang saham dan menjadi pihak terakhir yang menerima distribusi aset apabila perusahaan dilikuidasi. Saham ini biasanya dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi, tetapi juga menawarkan potensi keuntungan modal yang lebih besar. Sebaliknya, *saham preferen* memberikan prioritas dalam pembagian dividen dan likuidasi aset, tetapi umumnya tidak disertai hak suara. Saham preferen lebih menarik bagi investor yang mengutamakan stabilitas pendapatan, karena dividen biasanya ditetapkan dalam jumlah tetap (Brealey, Myers, & Allen, 2019).

8.2.2 Instrumen Keuangan Non-Ekuitas

Selain ekuitas, terdapat berbagai instrumen keuangan lain yang digunakan dalam pembiayaan dan investasi. Salah satunya adalah *bonds* atau surat utang, yang merupakan janji tertulis dari penerbit untuk membayar pokok dan bunga kepada pemegang obligasi sesuai jadwal tertentu. Instrumen ini digunakan oleh

pemerintah maupun korporasi untuk memperoleh dana dalam jangka menengah hingga panjang.

Instrumen lainnya meliputi *options*, yaitu kontrak derivatif yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu sebelum tanggal jatuh tempo. *Reksa dana* juga termasuk instrumen keuangan yang penting, di mana dana dari banyak investor dikumpulkan dan dikelola secara profesional untuk diinvestasikan ke dalam portofolio aset seperti saham dan obligasi (Fabozzi & Jones, 2015).

8.2.3 Relevansi Diversifikasi Instrumen

Diversifikasi instrumen keuangan dalam portofolio investasi merupakan strategi penting untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan pengembalian. Kombinasi antara ekuitas dan instrumen utang memberikan perlindungan terhadap fluktuasi pasar yang ekstrem. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik dan fungsi dari masing-masing instrumen menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan investasi yang bijak dan strategis. Selain itu, regulasi dan dinamika pasar modal juga memengaruhi tingkat risiko dan imbal hasil dari masing-masing instrumen, sehingga penting untuk menyesuaikannya dengan profil risiko investor.

8.3 Mekanisme Pasar dan Regulasi

8.3.1 Struktur dan Fungsi Mekanisme Pasar Keuangan

Mekanisme pasar keuangan merujuk pada sistem yang memungkinkan pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana

dan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui proses jual beli instrumen keuangan. Mekanisme ini mencakup serangkaian proses seperti pencatatan (*listing*), perdagangan (*trading*), penyelesaian transaksi (*clearing and settlement*), serta pelaporan kegiatan pasar.

Pasar keuangan terdiri dari pasar primer dan sekunder. Di pasar primer, instrumen diterbitkan langsung oleh emiten kepada investor, sedangkan di pasar sekunder, instrumen yang telah diterbitkan diperjualbelikan kembali antar investor. Efisiensi dan kepercayaan dalam mekanisme ini sangat bergantung pada transparansi informasi dan infrastruktur teknologi yang andal (Madura, 2021).

8.3.2 Peran Regulasi dan Otoritas Pengawas

Untuk memastikan bahwa pasar keuangan berfungsi secara adil dan stabil, diperlukan regulasi yang ketat serta pengawasan oleh otoritas yang berwenang. Regulasi dirancang untuk melindungi investor, mencegah praktik manipulatif seperti *insider trading*, serta menjaga integritas pasar.

Di banyak negara, lembaga pengawas seperti *Financial Services Authority* atau *Securities and Exchange Commission* memiliki mandat untuk menetapkan kebijakan, melakukan inspeksi, serta menindak pelanggaran pasar. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kewenangan mengawasi pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank (Tandelilin, 2017).

Regulasi juga mendorong penerapan prinsip *know your customer* (KYC) dan *anti-money laundering* (AML) untuk

memperkuat sistem keuangan yang sehat dan terhindar dari aktivitas ilegal.

8.3.3 Transparansi dan Keamanan Transaksi

Salah satu tujuan utama regulasi adalah menjamin transparansi dan keamanan dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban pelaporan, audit independen, serta keterbukaan informasi oleh emiten dan pelaku pasar lainnya. Selain itu, sistem perdagangan elektronik yang dilengkapi dengan enkripsi dan pengawasan real-time memperkuat perlindungan terhadap risiko teknis dan penipuan.

Dengan demikian, perpaduan antara mekanisme pasar yang efisien dan regulasi yang kuat menjadi landasan penting bagi kepercayaan publik dan stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan.

8.4 Peran Ekuitas dalam Pembiayaan Perusahaan

8.4.1 Pengertian dan Fungsi Ekuitas

Ekuitas merupakan salah satu komponen utama dalam struktur modal perusahaan yang berasal dari pemilik atau investor. Sebagai sumber pembiayaan jangka panjang, ekuitas memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan dan fleksibilitas operasional perusahaan. Tidak seperti utang, pembiayaan melalui ekuitas tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau pengembalian pokok secara berkala, sehingga memberikan ruang

manuver lebih besar bagi manajemen dalam mengelola dana dan risiko.

8.4.2 Ekuitas untuk Ekspansi dan Inovasi

Pembiayaan berbasis ekuitas menjadi pilihan utama perusahaan dalam mendukung program ekspansi, riset dan pengembangan (*research and development*), serta diversifikasi usaha. Dana dari hasil penerbitan saham dapat digunakan untuk membiayai proyek jangka panjang yang belum menghasilkan pendapatan langsung, seperti pengembangan teknologi baru atau penetrasi pasar global. Dengan tidak adanya kewajiban pembayaran bunga, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke aktivitas produktif yang meningkatkan nilai jangka panjang (Yusof & Bakar, 2012).

Lebih jauh, struktur modal yang sehat dengan porsi ekuitas yang memadai juga memperkuat daya tarik perusahaan di mata investor institusional, yang cenderung menghindari risiko keuangan tinggi akibat beban utang berlebih.

8.4.3 Implikasi Strategis dalam Pengambilan Keputusan

Ekuitas tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai indikator kepercayaan pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Peningkatan nilai ekuitas dapat tercermin dalam harga saham yang stabil atau meningkat, mencerminkan keyakinan investor terhadap manajemen dan strategi bisnis perusahaan.

Selain itu, perusahaan dengan proporsi ekuitas yang kuat umumnya memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi

volatilitas ekonomi, karena tidak terbebani dengan kewajiban utang tetap. Oleh karena itu, pengelolaan ekuitas yang bijak merupakan bagian integral dari strategi keuangan jangka panjang yang berkelanjutan (De Jong et al., 2011).

8.5 Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan antara saham biasa dan saham preferen!
2. Apa yang dimaksud dengan instrumen keuangan derivatif?
Berikan contohnya!
3. Bagaimana regulasi pasar keuangan mendukung perlindungan investor?
4. Mengapa ekuitas dianggap sebagai pembiayaan jangka panjang yang penting?
5. Apa saja risiko yang terkait dengan investasi pada instrumen keuangan?

Bab 9: Pendapatan, Beban, dan Laba Rugi Komprehensif

9.1 Pengertian Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban merupakan dua komponen utama dalam laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja keuangan suatu entitas selama periode tertentu. Pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal entitas, seperti penjualan barang, pemberian jasa, atau penggunaan sumber daya ekonomi oleh pihak lain yang menghasilkan kenaikan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi pemilik. Dalam konteks akuntansi keuangan, pengakuan pendapatan harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum seperti basis akrual dan pengukuran yang andal, agar laporan keuangan mencerminkan keadaan ekonomi yang sesungguhnya. PSAK 72 menjadi standar yang relevan dalam pengakuan pendapatan, karena menekankan lima langkah sistematis dalam mengidentifikasi kontrak, kewajiban pelaksanaan, dan waktu pengakuan pendapatan secara tepat.

Di sisi lain, beban mencerminkan arus keluar atau penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk pengeluaran atau pengurangan nilai aset yang mengakibatkan penurunan ekuitas, tidak termasuk yang berkaitan dengan distribusi

kepada pemilik. Beban dapat berasal dari berbagai sumber seperti biaya produksi, biaya administrasi, depresiasi, dan beban bunga. Tujuan utama dari pengakuan beban adalah untuk mencocokkannya dengan pendapatan yang diperoleh selama periode yang sama, sesuai dengan prinsip *matching* dalam akuntansi. Hal ini penting agar entitas dapat menilai secara wajar laba atau rugi bersih yang dihasilkan dari aktivitas usahanya (Scott, 2015).

Pemisahan yang jelas antara pendapatan dan beban sangat krusial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, terutama bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Interpretasi yang salah atau manipulasi terhadap pengakuan pendapatan dan beban dapat berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep dasar pendapatan dan beban menjadi landasan utama dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang andal dan berintegritas.

9.2 Pengakuan Pendapatan dan Beban

9.2.1 Prinsip Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan merupakan aspek krusial dalam pelaporan keuangan, yang bertujuan untuk mencerminkan kinerja ekonomi entitas secara wajar dan akuntabel. Menurut *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) 72, pendapatan diakui apabila manfaat ekonomi kemungkinan besar akan mengalir ke entitas dan nilai pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

Teknik berbasis *five-step model* PSAK 72 mencakup: identifikasi kontrak dengan pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penetapan harga transaksi, alokasi harga pada kewajiban pelaksanaan, dan pengakuan pendapatan ketika kewajiban terpenuhi. Model ini menekankan bahwa pendapatan tidak semata-mata diakui pada saat kas diterima, tetapi berdasarkan penyelesaian kewajiban kinerja yang disepakati dalam kontrak (Rahayu & Supriyati, 2020).

9.2.2 Prinsip Pengakuan Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan, baik dalam bentuk arus keluar maupun berkurangnya aset, yang dapat diukur secara andal dan berkontribusi terhadap pendapatan periode tersebut. PSAK 1 mengatur bahwa beban harus diakui secara sistematis dan rasional sesuai dengan pengakuan pendapatan yang terkait, atau ketika konsumsi manfaat ekonomi tidak lagi memberikan potensi arus kas di masa depan. Oleh karena itu, pengakuan beban harus mencerminkan keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan aktivitas entitas dalam menghasilkan pendapatan (Wibowo & Lestari, 2018).

9.2.3 Implikasi Akuntabilitas dan Transparansi

Penerapan prinsip pengakuan pendapatan dan beban yang tepat sangat penting untuk menjaga transparansi, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Ketidaktepatan dalam pengakuan—seperti pengakuan prematur pendapatan atau penundaan pengakuan

beban—dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dan menciptakan risiko manipulasi laporan laba rugi.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar akuntansi serta penguatan sistem pengendalian internal merupakan strategi penting dalam mencegah distorsi informasi keuangan. Pelaporan yang akurat tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola perusahaan.

9.3 Laba Rugi Komprehensif

9.3.1 Konsep Dasar Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif merupakan bagian penting dalam pelaporan keuangan yang mencerminkan seluruh perubahan ekuitas entitas selama satu periode, kecuali perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemilik, seperti distribusi dividen atau penyetoran modal. Konsep ini dikembangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pos-pos yang belum direalisasi, tetapi memiliki dampak ekonomi jangka panjang.

Pendapatan komprehensif dapat mencakup keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, perubahan nilai wajar aset keuangan tertentu, serta keuntungan atau kerugian dari program imbalan pascakerja. Dengan mencantumkan unsur-unsur ini, laporan laba rugi komprehensif memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dibandingkan laporan laba rugi konvensional (Graham et al., 2012).

9.3.2 Komponen Utama dan Karakteristik

Secara umum, komponen utama laba rugi komprehensif terbagi menjadi dua: laba rugi bersih (*net income*) dan pendapatan komprehensif lain (*other comprehensive income*). Laba rugi bersih mencerminkan hasil operasi perusahaan yang telah direalisasi, sementara pendapatan komprehensif lain terdiri atas pos-pos yang belum direalisasi namun wajib diakui berdasarkan standar akuntansi.

Penyajian pendapatan komprehensif dapat dilakukan dalam satu laporan tunggal atau dalam dua laporan terpisah: laporan laba rugi dan laporan pendapatan komprehensif lain. Standar internasional seperti IFRS dan PSAK di Indonesia mengakomodasi kedua prosedur tersebut, asalkan informasi yang disampaikan bersifat transparan dan konsisten dari periode ke periode (Barker & McGeachin, 2015).

9.3.3 Implikasi terhadap Pengambilan Keputusan

Laporan laba rugi komprehensif berperan penting dalam membantu pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, dan analis keuangan, untuk menilai stabilitas dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan. Informasi mengenai pendapatan komprehensif lain, misalnya, dapat mengindikasikan potensi risiko pasar atau perubahan nilai aset yang belum terealisasi, yang pada gilirannya memengaruhi nilai wajar perusahaan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap laba rugi komprehensif menjadi krusial dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih akurat dan berwawasan jangka panjang.

9.4 Penyajian dalam Laporan Keuangan

9.4.1 Prinsip Penyajian Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang disusun sesuai *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) 1. Dalam laporan ini, entitas diwajibkan menyajikan seluruh pendapatan dan beban yang diakui selama suatu periode, termasuk komponen penghasilan lain (*other comprehensive income*) yang belum direalisasi, seperti keuntungan dari revaluasi aset atau selisih kurs akibat penjabaran laporan keuangan luar negeri.

Penyajian informasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan entitas, tidak hanya berdasarkan laba bersih, tetapi juga mencakup komponen yang berpotensi memengaruhi ekuitas di masa mendatang (Yulius & Handayani, 2019).

9.4.2 Klasifikasi Pendapatan dan Beban

Dalam penyusunan laporan laba rugi komprehensif, pemisahan antara pendapatan dan beban operasional dengan yang non-operasional menjadi aspek penting. Pendapatan operasional, seperti hasil penjualan barang atau jasa utama perusahaan, disajikan terpisah dari pendapatan non-operasional seperti bunga, dividen, atau keuntungan dari pelepasan aset tetap.

Demikian pula, beban pokok penjualan dan beban administrasi diklasifikasikan secara terpisah dari beban lain seperti kerugian nilai wajar instrumen keuangan atau beban litigasi.

Pemisahan ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai efisiensi operasional serta sumber keuntungan perusahaan secara lebih akurat (Ramadhani & Fauzi, 2020).

9.4.3 Implikasi terhadap Analisis Kinerja

Penyajian yang sesuai dengan PSAK membantu pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan regulator, dalam mengevaluasi kinerja dan prospek perusahaan. Informasi laba komprehensif memungkinkan analisis menyeluruh terhadap stabilitas keuangan, risiko pasar, dan efektivitas strategi manajemen.

Oleh karena itu, ketepatan klasifikasi dan pengungkapan dalam laporan laba rugi komprehensif tidak hanya memenuhi persyaratan akuntansi formal, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang kredibel dan relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

9.5 Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian pendapatan menurut standar akuntansi keuangan!
2. Bagaimana kriteria pengakuan pendapatan menurut PSAK 72?
3. Apa yang dimaksud dengan laba rugi komprehensif dan bagaimana contohnya?
4. Mengapa penting memisahkan beban operasional dan non-operasional dalam laporan keuangan?

5. Berikan contoh transaksi yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain (OCI)!

Bab 10: Analisis dan Interpretasi Laporan Keuangan

10.1 Konsep Dasar Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas guna memahami kondisi keuangan, kinerja operasional, serta prospek keberlanjutan usaha. Proses ini melibatkan penggunaan teknik-teknik tertentu yang memungkinkan pengguna laporan, baik internal maupun eksternal, untuk menilai efisiensi dan efektivitas entitas dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dalam praktiknya, analisis laporan keuangan mencakup pembacaan menyeluruh terhadap laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas, yang kemudian diterjemahkan menjadi indikator-indikator keuangan yang relevan, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas.

Konsep dasar dari analisis laporan keuangan menekankan pada pentingnya interpretasi data numerik agar menjadi informasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Data keuangan yang tersedia dalam bentuk laporan akuntansi bersifat historis dan kuantitatif; oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang

tidak hanya mengandalkan perhitungan matematis, tetapi juga mempertimbangkan konteks ekonomi, strategi bisnis, serta kondisi pasar dan industri yang melingkupi entitas tersebut. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah *horizontal analysis* dan *vertical analysis*, di mana analisis horizontal mengamati tren perubahan antarperiode, sedangkan analisis vertikal mengevaluasi proporsi masing-masing pos terhadap total tertentu dalam satu periode laporan.

Interpretasi laporan keuangan memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan, baik oleh manajemen, investor, kreditor, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya. Manajemen, misalnya, memerlukan hasil analisis untuk mengevaluasi efektivitas strategi operasional dan efisiensi pengelolaan aset. Sementara itu, investor menggunakan informasi ini untuk menilai risiko dan potensi imbal hasil investasi. Kreditor mempertimbangkan hasil analisis untuk mengukur kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Oleh karena itu, validitas dan keandalan hasil analisis sangat bergantung pada integritas data keuangan serta ketepatan prosedur yang digunakan (Palepu et al., 2020).

Selain teknik dasar seperti analisis rasio keuangan, perkembangan dunia bisnis dan teknologi telah mendorong penggunaan analisis lanjutan berbasis *data analytics* dan pemodelan keuangan yang memanfaatkan perangkat lunak canggih. Teknik ini tidak hanya meningkatkan akurasi dalam menilai kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga memberikan proyeksi berbasis skenario yang

mendukung perencanaan strategis jangka panjang. Misalnya, pemanfaatan teknik *predictive modeling* dalam menganalisis arus kas masa depan dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen risiko (Wahlen et al., 2018).

Meski demikian, penting untuk diingat bahwa hasil analisis laporan keuangan bukanlah sebuah kebenaran absolut, melainkan interpretasi yang dipengaruhi oleh asumsi, estimasi, dan teknik yang digunakan oleh analis. Oleh sebab itu, analisis yang baik selalu disertai dengan penilaian kritis terhadap kemungkinan adanya bias akuntansi, manipulasi laporan keuangan, serta ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi riil dengan informasi yang tersaji secara formal. Oleh karena itu, kemampuan analitis yang baik memerlukan kombinasi antara pengetahuan teknis, pemahaman terhadap bisnis, serta sikap skeptis profesional yang konstruktif. Dengan teknik tersebut, analisis dan interpretasi laporan keuangan akan menjadi alat yang efektif untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.

10.2 Pentingnya Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan proses sistematis dalam mengevaluasi informasi keuangan suatu entitas untuk memahami kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek masa depan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga prospektif, karena digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu,

analisis laporan keuangan menjadi instrumen penting dalam sistem keuangan modern, baik di sektor privat maupun publik.

10.2.1 Pentingnya Analisis Laporan Keuangan

Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kesehatan finansial perusahaan melalui interpretasi data akuntansi historis. Dalam praktiknya, analisis ini bertujuan mengukur likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, serta efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan (Fraser & Ormiston, 2015). Informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti evaluasi kinerja manajemen, penilaian risiko investasi, atau penentuan strategi bisnis jangka panjang.

Selain itu, analisis laporan keuangan juga bertujuan menyediakan dasar objektif bagi perbandingan antarperiode atau antarperusahaan sejenis dalam industri yang sama. Dengan menggunakan indikator-indikator seperti rasio keuangan, tren historis, dan analisis vertikal-horizontal, pengguna laporan keuangan dapat mengidentifikasi pola dan anomali yang relevan dengan keberlanjutan usaha.

10.2.2 Kegunaan bagi Pemangku Kepentingan

Manfaat analisis laporan keuangan sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Bagi investor dan kreditor, analisis ini memberikan pemahaman terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjang. Informasi tersebut penting untuk mengelola risiko investasi dan membuat keputusan pendanaan yang rasional (Wild et al., 2019).

Sementara itu, bagi manajemen internal, analisis laporan keuangan membantu dalam menilai efektivitas kebijakan operasional dan keuangan yang telah diterapkan. Analisis ini juga mendukung proses perencanaan strategis serta pengendalian manajerial, dengan cara mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Bagi regulator dan otoritas pajak, laporan keuangan yang telah dianalisis dapat menjadi alat pengawasan atas kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kewajiban fiskal.

10.2.3 Peran dalam Pengambilan Keputusan

Analisis laporan keuangan berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*). Melalui teknik analitis yang objektif, keputusan yang dihasilkan akan lebih akurat dan terukur. Sebagai contoh, keputusan untuk ekspansi usaha, merger, atau restrukturisasi utang sangat bergantung pada hasil analisis terhadap rasio profitabilitas dan struktur modal.

Lebih lanjut, perusahaan dapat menggunakan hasil analisis ini untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif serta kelemahan struktural yang mungkin menghambat pertumbuhan. Dengan demikian, analisis laporan keuangan tidak hanya bersifat diagnostik, tetapi juga strategik dalam menentukan arah kebijakan korporasi.

10.3 Teknik dan Rasio dalam Analisis Keuangan

Analisis keuangan merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas melalui interpretasi data akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan. Dalam konteks dunia bisnis modern, analisis keuangan berfungsi sebagai alat strategis untuk menilai posisi keuangan, efisiensi operasional, serta prospek pertumbuhan perusahaan. Salah satu teknik utama dalam analisis keuangan adalah penggunaan rasio keuangan (*financial ratios*), yang membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kekuatan dan kelemahan entitas secara komparatif.

10.3.1 Konsep dan Pentingnya Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan bertujuan untuk menilai kinerja masa lalu, kondisi saat ini, dan potensi masa depan perusahaan. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap laporan laba rugi, neraca/laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Melalui analisis tersebut, manajemen dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan menentukan strategi peningkatan efisiensi serta profitabilitas (Palepu et al., 2020).

Selain itu, analisis keuangan juga digunakan oleh investor dan kreditor untuk menilai risiko investasi, tingkat pengembalian, dan likuiditas perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan tidak

hanya menjadi alat pencatatan, tetapi juga media komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan.

10.3.2 Teknik Analisis Keuangan

Terdapat beberapa teknik utama yang digunakan dalam analisis laporan keuangan, yaitu:

- a. **Analisis horizontal** – membandingkan data keuangan dari periode yang berbeda untuk menilai tren pertumbuhan atau penurunan.
- b. **Analisis vertikal** – menganalisis proporsi setiap komponen terhadap total kategori dalam laporan keuangan, misalnya kontribusi penjualan terhadap total pendapatan.
- c. **Analisis rasio keuangan** – mengukur hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan keuangan untuk mengevaluasi aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi.
- d. **Analisis arus kas** – menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mengelola kas guna mendukung kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan.

Penerapan kombinasi teknik ini memungkinkan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Gibson, 2016).

10.3.3 Interpretasi Rasio Keuangan dalam Pengambilan Keputusan

Rasio keuangan merupakan indikator utama dalam analisis keuangan yang membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi stabilitas dan kinerja perusahaan. Beberapa rasio penting antara lain:

- a. **Rasio likuiditas:** menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio yang umum digunakan seperti *Current Ratio* dan *Quick Ratio*.
- b. **Rasio profitabilitas:** mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, jumlah aset, atau jumlah modal tertentu. Rasio yang digunakan yaitu *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).
- c. **Rasio solvabilitas:** menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), *Debt-to-Assets Ratio* (DAR), dan *Times Interest Earned* (TIE).
- d. **Rasio aktivitas:** menggambarkan efisiensi penggunaan aset, misalnya *Inventory Turnover* atau *Receivable Turnover*.
- e. **Rasio pasar:** mengukur perkembangan harga pasar (nilai) perusahaan jika dibandingkan dengan nilai buku Perusahaan dari sudut pandang investor dan/atau calon investor. Rasio pasar yang digunakan umumnya adalah *Price Earning Ratio* (PER), *Dividend Yield*, dan *Dividend Payout Ratio* (DPR).

Interpretasi rasio keuangan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus dikaitkan dengan konteks industri, kondisi ekonomi, dan kebijakan manajerial perusahaan. Dengan demikian, analisis keuangan yang komprehensif menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis yang berbasis data dan mitigasi risiko keuangan.

10.4 Latihan Soal

1. Jelaskan tujuan utama dari analisis laporan keuangan!
2. Sebutkan dan jelaskan jenis rasio keuangan beserta fungsinya!
3. Apa perbedaan antara analisis horizontal dan vertikal dalam laporan keuangan?
4. Mengapa interpretasi penting dalam proses analisis laporan keuangan?
5. Bagaimana analisis rasio keuangan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis?

Profil Penulis



Henny Wirianata, SE., MSi., Ak., CA., CSRS+. lahir di Jakarta pada 21 Juni 1977 dan saat ini berdomisili di Tangerang. Ia memiliki hobi membaca, menonton, dan melakukan cross-stitch. Melalui bukunya, ia berharap dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi para pembaca.



Dr. Dewi Puji Rahayu, S.E., M.Ak. lahir di Jakarta pada 1 November 1989 dan saat ini berdomisili di Tangerang Selatan. Ia memiliki hobi traveling dan meyakini pepatah dari Imam Syafi'i: "Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan."



Anisah Novi Karunia, M.Sc. lahir di Yogyakarta. Penulis adalah dosen pada Program Studi D4 Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan melanjutkan S2 pada program studi Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). Penulis menekuni bidang keahlian akuntansi terutama keuangan, dan perpajakan. Sementara itu, penulis juga aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk dari kontribusi nyata dalam mengembangkan keilmuan akuntansi.



Zakia Maulida Antono, S.S.T., M.Sc. lahir di Semarang pada 9 Agustus 1995 dan saat ini berdomisili di Semarang. Ia memiliki hobi membaca dan traveling. Buku ini ditulis sebagai wujud kontribusinya dalam memperkaya literatur akuntansi keuangan di

Indonesia. Ia berharap isi buku ini dapat membantu pembaca memahami konsep akuntansi secara lebih mudah dan aplikatif, serta menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan mengembangkan profesi di bidang akuntansi. Menurutnya, ilmu akuntansi bukan sekadar menghitung angka, tetapi juga memahami makna di balik setiap angka.



Alfiyah Aditya Rahmawati, S.E., M.Ak. lahir di Semarang pada 21 Juli 1993 dan saat ini berdomisili di Kota Semarang. Ia memiliki hobi journaling. Buku ini dirancang menjadi sahabat belajar bagi pembaca dalam memahami konsep akuntansi keuangan menengah dengan cara yang mudah dan

relevan.



Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si. lahir di Pekalongan pada 2 Maret 1972 dan saat ini berdomisili di Tangerang, Banten. Ia memiliki hobi membaca dan traveling. Menurutnya, buku *Akuntansi Keuangan Menengah* ini merupakan panduan komprehensif yang dirancang untuk menjembatani jurang antara

teori dan praktik akuntansi. Buku ini bukan sekadar kumpulan konsep, melainkan peta jalan bagi pembaca untuk memahami struktur pelaporan keuangan yang kompleks dan dinamis.



Retno Hernawati, M.Pd. lahir di Klaten pada 6 Mei 1996 dan saat ini berdomisili di Kupang, NTT. Ia memiliki hobi baking. Ia berharap buku ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi para pembaca.



Willy Nurhayadi, S.E., M.Ak. lahir di Serang pada 15 Januari 1992 dan saat ini berdomisili di Kota Serang. Ia memiliki hobi belajar. Menurutnya, buku ini lahir dari rangkaian pengalaman, pengamatan, serta proses belajar yang tak henti-hentinya. Setiap halaman ditulis dengan harapan dapat memberikan manfaat, inspirasi, atau sekadar menjadi teman berpikir dalam perjalanan intelektual bagi pembaca.



Nursakti Niko Rosandy, CA., CPA., CMA., CGBA., CIR., CIB., ACPA. lahir di Jember pada 30 November 1985 dan saat ini berdomisili di Jakarta Selatan. Ia memiliki hobi jalan-jalan, membuat kreasi konten, dan lari. Ia mendorong pembaca untuk terus belajar, berbagi, dan melayani masyarakat dengan prinsip: *“Keep learning. Keep sharing. Keep serving society!”*

Daftar Pustaka

- Alexander, D., & Nobes, C. (2020). *Financial accounting: An international introduction* (6th ed.). Pearson Education Limited.
- Baridwan, Z. (2017). *Intermediate accounting* (10th ed.). BPFE Yogyakarta.
- Barker, R., & McGeachin, A. (2015). The recognition and measurement of liabilities in IFRS. *Accounting and Business Research*, 45(1), 5–36.
- Barth, M. E. (2018). The future of financial reporting: Insights from research. *Abacus*, 54(1), 56–65.
- Barth, M. E., & Schipper, K. (2015). Financial reporting transparency. *Journal of Accounting Research*, 53(3), 511–544.
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2019). *Principles of Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2019). *Financial Management: Theory and Practice* (16th ed.). Boston: Cengage Learning.
- International Accounting Standards Board (IASB). (2014). *IFRS 9: Financial Instruments*. London: IFRS Foundation.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Boston: Cengage Learning.

- Brüggemann, U., Hitz, J. M., & Sellhorn, T. (2017). Intended and unintended consequences of mandatory IFRS adoption: A review of extant evidence and suggestions for future research. *European Accounting Review*, 26(1), 1–38.
- Clark, I., Grabski, S. V., & Santhanakrishnan, A. (2020). Financial reporting complexity and managerial decision making: Evidence from lease accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 86, 101156.
- De George, E. T., Li, X., & Shivakumar, L. (2016). A review of the IFRS adoption literature. *Review of Accounting Studies*, 21(3), 898–1004.
- De Jong, A., Verbeek, M., & Verwijmeren, P. (2011). *Firms' debt–equity decisions when the static tradeoff theory and the pecking order theory disagree*. *Journal of Banking & Finance*, 35(5), 1303–1314.
- Fabozzi, F. J., & Jones, F. J. (2015). *Investments: Concepts and Applications* (12th ed.). Pearson.
- Fraser, L. M., & Ormiston, A. (2015). *Understanding financial statements* (10th ed.). Pearson Education.
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2021). *Managerial Accounting* (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Gibson, C. H. (2016). *Financial reporting and analysis* (13th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2022). *Principles of Managerial Finance* (16th ed.). Pearson Education.

- Graham, R. C., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2012). Value destruction and financial reporting decisions. *Financial Analysts Journal*, 68(6), 45–58.
- Hanafi, Mamduh M. & Abdul Halim. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM UKPN.
- Harrison, W. T., Horngren, C. T., & Thomas, C. W. (2021). *Financial accounting* (12th ed.). Pearson Education.
- Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2018). *Cost accounting: A managerial emphasis* (16th ed.). Boston: Pearson Education.
- Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2021). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis* (17th ed.). Pearson Education.
- Horngren, C. T., Harrison, W. T., & Oliver, M. S. (2019). *Financial accounting* (12th ed.). Pearson Education.
- Horngren, C. T., Harrison, W. T., Oliver, M. S., Best, P., Fraser, D., Tan, R., & Willett, R. (2019). *Accounting* (11th ed.). Melbourne: Pearson Education.
- IFRS Foundation. (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. IFRS Foundation.
- IFRS Foundation. (2019). *International Financial Reporting Standards (IFRS) 9 & 16*. IFRS Foundation.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis IFRS*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Accounting Standards Board. (2018). *Conceptual framework for financial reporting*. IFRS Foundation.

- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2016). *Intermediate accounting* (15th ed.). Wiley.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting* (16th ed.). Wiley.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting* (17th ed.). Wiley.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Warfield, T. D.. (2020). *Intermediate Accounting 4th Edition: IFRS Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- Madura, J. (2021). *Financial markets and institutions* (13th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Madura, J. (2021). *Financial Markets and Institutions* (13th ed.). Cengage Learning.
- Palepu, K. G., Healy, P. M., & Peek, E. (2020). *Business analysis and valuation: IFRS edition* (6th ed.). London: Cengage Learning.
- Rahayu, S., & Supriyati. (2020). Implementasi PSAK 72 dalam pengakuan pendapatan: Studi kasus pada perusahaan jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 45–56.
- Ramadhani, F., & Fauzi, A. (2020). *Pengaruh komponen laba rugi komprehensif terhadap keputusan investasi*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 44–56.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2019). *Fundamentals of Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill Education.

- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2019). *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases* (13th ed.). John Wiley & Sons.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2022). *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases* (13th ed.). Wiley.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Pearson Education Canada.
- Scott, W. R. (2019). *Financial Accounting Theory* (8th ed.). Pearson Education.
- Suwardjono. (2019). *Teori akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan* (4th ed.). BPFE.
- Tamm, K. (2021). IFRS adoption and challenges in emerging economies: A comparative analysis. *Journal of International Accounting Research*, 20(3), 102–117.
- Tandelilin, E. (2017). *Portofolio dan investasi: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wagenhofer, A. (2016). The role of information transparency for accounting and financial reporting. *Accounting and Business Research*, 46(5), 524–541.
- Wahlen, J. M., Baginski, S. P., & Bradshaw, M. T. (2018). *Financial reporting, financial statement analysis, and valuation* (9th ed.). Cengage Learning.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2020). *Accounting Principles* (13th ed.). Wiley.

- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2020). *Financial accounting: IFRS edition* (4th ed.). Wiley.
- White, G. I., Sondhi, A. C., & Fried, D. (2021). *The analysis and use of financial statements* (4th ed.). Wiley.
- Wibowo, A., & Lestari, R. (2018). Pengaruh prinsip akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan: Tinjauan PSAK 1. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 112–123.
- Wild, J. J., Subramanyam, K. R., & Halsey, R. F. (2014). *Financial Statement Analysis* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Wild, J. J., Subramanyam, K. R., & Halsey, R. F. (2019). *Financial statement analysis* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Yulius, A., & Handayani, S. R. (2019). *Kualitas penyajian laporan keuangan dan implikasinya terhadap transparansi informasi*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 112–121.
- Yusof, R. M., & Bakar, A. A. (2012). *Equity financing and firm performance: Evidence from Malaysian technology sector*. *International Journal of Business and Social Science*, 3(5), 56–66.

Buku ajar berjudul **Akuntansi Keuangan Menengah: Konsep, Standar, dan Aplikasi Praktis** menyajikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dan praktik akuntansi dalam dunia nyata. Dengan penjelasan yang lugas dan contoh-contoh praktis, buku ini membahas penyusunan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi, serta analisis informasi keuangan yang penting bagi pengambilan keputusan.

Dirancang untuk masyarakat umum yang ingin memperluas pengetahuan tentang akuntansi, buku ini membantu pembaca memahami cara kerja sistem keuangan dan laporan bisnis secara jelas, tanpa harus memiliki latar belakang khusus di bidang akuntansi.

